



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT KERJA KOMISI V DPR RI  
DENGAN MENTERI PERHUBUNGAN RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : II  
Rapat Ke- :  
Jenis Rapat : Raker  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Kamis, 24 November 2022  
Waktu : Pukul 10.00 s.d. 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)  
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si. (F-PDIP) – Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022;  
2. Penyerahan hasil kompilasi kunjungan kerja pada MS I 2022-2023;  
3. Lain-lain.
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:  
44 dari 56 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)  
11 dari 12 orang Anggota
    1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
    2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
    3. Mochamad Herviano
    4. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.
    5. Sukur H. Nababan, S.T.
    6. Ir. Sudjadi
    7. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
    8. Sri Rahayu
    9. Ir. Effendi Sianipar
    10. Harvey B. Malaihollo
    11. Djenri Alting Keintjem, SH., M.H.
  2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)  
7 dari 8 orang Anggota
    1. Ir. Ridwan Bae
    2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
    3. Cen Sui Lan
    4. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
    5. Ilham Pangestu

6. Muhammad Fauzi, S.E.
  7. Ir. H. Anang Susanto, M.Si.
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA  
(F-GERINDRA)  
7 dari 7 orang Anggota
    1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
    2. Ir. Sumail Abdullah
    3. Sudewo, S.T., M.T.
    4. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
    5. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
    6. Drs. H. Mulyadi, M.MA.
    7. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)  
3 dari 6 orang Anggota
    1. Roberth Rouw
    2. Drs. H. Soehartono, M.Si.
    3. Sri Wahyuni
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN  
BANGSA (F-PKB)  
3 dari 6 orang Anggota
    1. H. Ruslan M. Daud
    2. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
    3. Sofyan Ali, S.H.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)  
5 dari 5 orang Anggota
    1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
    2. Willem Wandik
    3. Drs. H. Anwar Hafid M.Si.
    4. Lasmi Indaryani, S.E.
    5. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN  
SEJAHTERA (F-PKS)  
3 dari 5 orang Anggota
    1. Ir. H. Sigit Sosiantomo
    2. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.
    3. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
(F-PAN)  
3 dari 5 orang Anggota
    1. Athari Ghauthi Ardi
    2. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
    3. H. Boyman Harun, S.H.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN (F-PPP)  
2 dari 2 orang Anggota  
1. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.  
2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Menteri Perhubungan RI (Ir. Budi Karya Sumadi) beserta jajaran.

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT:**

Kita mulai rapat kita pada siang hari ini, mohon izin Pak Menteri.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,  
Yang terhormat Menteri Perhubungan beserta seluruh jajarannya, hadirin  
yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk melaksanakan rapat sesuai dengan jadwal dan agenda pembicaraan yang sudah kita sampaikan melalui surat undangan.

Rapat ini dihadiri secara fisik dan juga masih dihadiri secara *virtual*, kami semua menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah gempa bumi di Cianjur, ya, Pimpinan dan Komisi V, ya, ucapkan turut berbelasungkawa dan berbela rasa atas korban dan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana gempa di Cianjur. Semoga Saudara-Saudara kita yang dipanggil Tuhan dalam kejadian ini mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.

Berdasarkan informasi yang kami terima dari Sekretariat, rapat ini dihadiri 35 Anggota, 20 orang hadir secara fisik, dan 15 orang hadir virtual dengan dihadiri 8 unsur fraksi yang berbeda, maka sesuai dengan ketentuan rapat ini sudah memenuhi kuorum. Tapi sebelum saya buka, saya mau sampaikan bahwa ada pergeseran Anggota di Komisi V DPR RI, ada yang masuk dan ada yang keluar, ya, itu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Saudari Irine Yusiana Roba Putri, Nomor Anggota 262, Dapil Maluku Utara, menggantikan Saudara Irmadi Lubis pindah ke Komisi I, dan Saudara Djenri Alting Keintjem, Nomor Anggota 253, Dapil Sulawesi Utara, menggantikan Almarhum H. Herson Mayulu.

Seperti yang tadi saya sampaikan rapat ini sudah memenuhi kuorum dengan dihadiri oleh 20 orang Anggota, *eh* 35 Anggota, 20 fisik, dan 15 *virtual*. Maka sesuai dengan Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkan

kami membuka Rapat Kerja pada hari ini dengan Menteri Perhubungan dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

### **(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)**

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Saudara Menteri Perhubungan beserta seluruh jajarannya yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini, membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, Penyerahan Hasil Kompilasi Kunjungan Kerja Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2022-2023 dan lain-lain yang dipandang perlu.

#### **Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI, Saudara Menteri hadirin yang berbahagia,**

Adapun hal yang menjadi catatan kami terkait Evaluasi APBN Tahun 2022, bahwa Realisasi Anggaran Kementerian Perhubungan per 23 November 2022 adalah sebesar 75,63%, jika dibanding Tahun 2021 realisasi pada bulan November 2021 mencapai 75,47%, dan pada akhir 2021 mencapai 97,21% dengan asumsi kinerja seperti Tahun 2021, maka penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan pada akhir Tahun 2022 diperkirakan naik dari tahun sebelumnya. Kita ucapkan apresiasi Pak Menteri, ya, inilah yang kita harapkan dari Komisi V, terjadinya peningkatan serapan, berarti itu namanya peningkatan kinerja, Pak.

Untuk itu pada kesempatan rapat kerja ini, kami perlu mendapatkan penjelasan dari Kementerian Perhubungan tentang upaya-upaya yang harus dilakukan, agar penyerapan anggaran dapat ditingkatkan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Selanjutnya, sebagaimana surat Direktur Angkutan Udara, Direktorat Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Nomor UM-207 tanggal 17 November 2022, Perihal Rencana Pengesahan Protokol untuk melaksanakan Paket ke-9, ke-10, dan ke-11 Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa atau *Avast*, dan selanjutnya meminta dukungan Komisi V DPR RI untuk, kami setuju, Pak. Jadi, Komisi V DPR RI terkait hal ini mendapat surat dari Pimpinan DPR, bahwa kita ada meratifikasi Protokol 9, 10, 11, ya, Perjanjian Kerja Sama Angkutan Udara dengan Negara-negara di ASEAN. Kemarin sudah kami bahas dengan Badan Keahlian DPR, terkait aturan ini dan sudah disampaikan secara detail kepada kami.

Prinsip Komisi V menyetujui Pak Menteri, untuk kita meratifikasi Protokol ke 9,10, dan 11 Aturan Angkutan Udara di Negara-negara di ASEAN. Nanti kita tanggal 6, mohon izin Pak Menteri, kita akan melakukan Raker dengan Kementerian untuk kami mengambil keputusan bersama dengan Kementerian Perhubungan, ya, selanjutnya nanti hasil kesepakatan kita, akan kita kirim ke Pimpinan DPR untuk selanjutnya kembali kita kirim kepada Presiden, sebagai bentuk persetujuan DPR bahwa kita setuju untuk meratifikasi Protokol ke 9, 10, dan 11 Aturan Angkutan Udara Negara-negara di ASEAN.

Selain itu berdasarkan pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi V DPR RI terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian dari Kementerian Perhubungan dalam rapat kerja pada hari ini, di antaranya:

1. Perlu meningkatkan sistem *monitoring* dan evaluasi yang rutin, serta melaksanakan koordinasi secara reguler untuk mempercepat realisasi anggaran di masing-masing unit kerja dalam lingkup Kementerian Perhubungan.
2. Sejauh mana pencapaian pelaksanaan program setiap unit kerja dalam rangka pengembangan konektivitas transportasi yang mengedepankan keselamatan dan keamanan bertransportasi
3. Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat mengembangkan inovasi, profesionalitas, dan kompetensi kerja yang berintegritas di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Demikian, pengantar rapat yang dapat kami sampaikan, selanjutnya saya persilakan Saudara Menteri Perhubungan untuk dapat menyampaikan paparannya berdasarkan undangan agenda rapat yang sudah kami sampaikan, kami persilakan.

**MENTERI PERHUBUNGAN RI (Dr. (H.C.) Ir. BUDI KARYA SUMADI):**

Terima kasih, Pak Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Shalom,  
Om swastiastu,  
Namo budaya, dan  
Salam kebajikan,*

**Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi V, para Wakil Komisi V, dan para Anggota Komisi V yang saya banggakan.**

Mengawali rapat kerja hari ini, tentu kita menghaturkan puji syukur kepada Allah SWT yang sudah memberikan nikmat dan karunia sehingga rapat ini, rapat evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2022 dan penyerahan hasil kompilasi kunjungan kerja pada Masa Persidangan pertama di Sidang 2022 dan 2013.

Dalam kesempatan ini, atas nama pribadi dan atas nama Kementerian Perhubungan, terlebih dahulu kita mengajak untuk kita berempati menyampaikan duka cita yang mendalam, kita mendoakan saudara kita yang berada di Cianjur atas musibah gempa bumi yang terjadi Senin lalu, semoga upaya kolaboratif dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak kerusakan dan membantu korban berjalan dengan optimal, Kementerian Perhubungan melalui satuan kerja sudah mengirimkan tim di sana dan secara berurutan masing-masing sektor mengirimkan bantuan-bantuan, terutama bantuan-bantuan yang sifatnya *urgent* saat ini, yaitu berupa makanan dan selimut.

**Bapak Ketua, Bapak, Bapak Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V yang saya banggakan,**

Sesuai dengan agenda rapat hari ini, saya menyampaikan singkat, perihal Evaluasi Pelaksanaan APBN 2022 yaitu terkait Evaluasi Pelaksanaan APBN, kami sampaikan bahwa Pagu awal adalah 32,94 Miliar, tetapi dengan adanya *automatic adjustment*, penambahan saldo BLU, peluncuran SBSN, peluncuran PHLN, penambahan BA BUN, penambahan LMAN, dan juga yang luar negeri, lalu rekomposisi antara rupiah murni, Eselon I dan pengurangan Pagu Anggaran dari BKT ke BRIN. Dan, ini kami laporkan bahwa *adjustment* BA BUN sebanyak 1,1 Triliun dan pengurangan Pagu BLU sebesar 34 Miliar, 36 Miliar, sehingga mengubah anggaran Kementerian Perhubungan yang semula 32,9 menjadi 33,5 Triliun.

Capaian realisasi Kementerian Perhubungan, saat ini adalah 75% atau kira-kira lebih dari 25 Triliun, ini dengan prestasi kumulatifnya adalah 78%, relatif sama dengan prestasi 2021, artinya capaian kita di 2022 yang melebihi target daripada rencana itu akan tercapai, dan capaian ini memang sedikit rendah, tetapi kita konsisten akan melakukan dan secara mingguan kami mengadakan rapat koordinasi di tingkat sampai Eselon III dan beberapa identifikasi terlihat masalah-masalah finalisasi kontrak, seperti PHLN dan sebagainya, dan beberapa hal-hal yang memang kita pindahkan alokasinya yang tadinya di tempat tertentu kita pindahkan agar dana ini terserap dengan baik.

**Pak Ketua, Pak, Bapak Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V yang berbahagia,**

PNBP sendiri mencapai 7,6 Triliun atau 90%, ya, dan ini di atas dari apa yang telah ditetapkan, kami memang optimis bahwa PNBP Perhubungan akan terealisasi saat, sebesar 8,6 Triliun, tapi kita tetap berusaha untuk lebih dari itu. Sekedar informasi bahwa sektor laut adalah sektor penghasil PNBP terbesar, sementara udara dan kereta api lagi *stagnan* bahkan kurang dari sebelumnya, darat relatif sama dengan tahun lalu, sehingga satu yang melebihi, ada dua yang berkecenderungan *stagnan* untuk pencapaian yang lebih tinggi.

Untuk memastikan pencapaian target tersebut kami telah melakukan, sebelum ini kita lakukan optimalisasi. Jadi, kalau kita pastikan ada satu anggaran yang tidak selesai atau tidak bisa dilaksanakan, maka kami melakukan pergeseran PNBP ke yang sifatnya adalah pelayanan. Mengantisipasi pekerjaan yang diperkirakan melewati tahun-tahun, kita memang mempersilakan mereka yang melewati batas waktu Bulan Desember, kita berikan kesempatan mereka dapat mengambil sejauh ada Bank Garansi. Oleh karenanya, langkah-langkah strategis kita adalah optimalisasi sisa anggaran, pergeseran PNBP untuk kegiatan yang sifatnya pelayanan, antisipasi pekerjaan yang diperkirakan melewati Tahun 2022, dan lakukan *monitoring* bagi seluruh unit kerja.

**Bapak Ketua dan Bapak-Bapak Wakil Ketua, serta Anggota Komisi V yang saya hormati dan saya banggakan,**

Sebagaimana Tema RKP 2022, Pemulihan Ekonomi Reformasi Struktural, Kementerian Perhubungan mendukung PN ke-5 yang berfokus pada penguatan, infrastruktur untuk mendukung pengembangan teknologi dan pelayanan dasar dengan melakukan pembangunan, infrastruktur sektor transportasi, implementasinya sepanjang 2020, kami terus berbenah dan memberikan layanan terbaik dan berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang capaian-capaiannya adalah sebagai berikut.

Telah diselesaikan revitalisasi dan operasional dari Bandara Halim Perdana Kusuma, telah mengoptimalkan operasi Bandara Kertajati, berapa hari yang lalu sudah digunakan untuk Umroh. *Nah*, ini bisa menjadi titik layanan baru sekaligus mendapatkan potensi manusia yang akan bepergian. Penyelesaian beberapa infrastruktur, di antaranya di Bali dan di kota-kota yang lain, terutama berkaitan dengan 2020 menjadi *concern* bagi kita, ada sedikit hal yang mungkin diklarifikasi bahwa Tusi daripada kewenangan mengelola anggaran ini apakah mutlak, apakah ada negosiasi, mungkin diperlukan pembahasan lebih lanjut.

Pemberdayaan masyarakat kita laksanakan dengan baik, kita akan membangun *Proving Ground*. Apa itu *proving ground* adalah satu kegiatan uji tipe untuk kendaraan yang saatnya nanti sebagai potensi untuk diekspor. Penyelenggaraan tol laut mengalami peningkatan yang baik segi trayek, jumlah muatan maupun kapasitas. Uji coba terbatas pada Kereta Api Makassar-Parepare dengan ruang Stasiun Garonggong sampai Mangilu dan menjadi jalur kereta api pertama di Sulawesi. Capaian itu tentunya tidak terlepas dari motivasi dan terus kerja, berkarya, dan bimbingan dari Komisi V, sehingga kami bisa mampu untuk melaksanakannya.

**Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan para Anggota yang saya banggakan,**

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, semoga raker ini dapat membuahkan masukan-masukkan dan saran, dan pendapat Pimpinan dan Anggota, sangat kami tunggu untuk meng-*improve* kinerja Kementerian Perhubungan, sekian terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat pagi,  
*Shalom,*  
*Om swastiastu,*  
*Namo budaya,*  
*Salam kebajikan.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Menteri, ya, atas paparannya. Bapak-Ibu sekalian, fokus agenda kita ini kan utamanya terkait dengan serapan, ya, kita berharap

APBN Tahun 2022 yang sekarang sedang *on going*, ya, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, ya, tentu yang juga belum lelang sekarang udah bulan November ya, kita berharap semua sudah selesai ya, kecuali yang *multiyears* misalnya kalau masih ada, karena udah November ini sudah tipis harapan kalau masih ada yang belum lelang. *Nah*, mungkin Pak Menteri sebelum ke teman-teman untuk kegiatan-kegiatan 2022, apakah semua sudah lelang semua Pak? Atau mungkin masih ada yang belum lelang, barangkali perlu dijelaskan ke kami Pak, kalau belum apa hambatannya, tapi kalau sudah semua tentu itu harapan kami, Pak. Mungkin saya persilakan, Pak Menteri.

**MENTERI PERHUBUNGAN RI (Dr. (H.C.) Ir. BUDI KARYA SUMADI):**

Yang belum apa ya, kira-kira.

Jadi, Pak Ketua kita memang melihat beberapa pekerjaan itu sisa, baik karena harganya lebih rendah maupun perubahan teknis. *Nah*, alokasi itu kita pindahkan ke alokasi baru, jadi *nggak* sampai limalah, Pak, kita belum tender, dan kita lakukan bulan-bulan ini sebelum tanggal 1, tapi itu untuk kegiatan yang pasti terserap, seperti kita itu kekurangan Perintis Udara dan Perintis Laut. Jadi, begitu ini dapat uang serta merta kita bisa bayarkan, seperti diketahui Perintis Laut itu kita kekurangan anggaran, anggaran kita *tuh* hanya cukup sampai bulan Oktober. Jadi, kita mengumpulkan sisa-sisa anggaran, kita kalau perintis itu langsung dilakukan, tapi ada beberapa yang sifatnya lelang, tapi tidak signifikan, jumlahnya kecil dan *item*-nya juga tidak banyak, terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih, Pak Menteri.

Izin Pak Menteri, kemarin kita ada, raker, Pak ya, rakor, Pak ya, dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, saya begitu pulang dari sana itu Pak Menteri, banyak dihubungi oleh para-para kepala daerah. *Nah*, sekarang kan kalau kita perintis itu, perintis yang kita beri subsidi itu kan perintis yang memang bandara-bandara yang betul-betul ya, masih belum ada penerbangan komersialnya. *Nah*, untuk bandara-bandara yang sudah ada penerbangan komersial, per hari ini juga sudah banyak bandara kita, tapi *nggak* ada maskapai mau datang Pak, bisa jadi *demand*-nya rendah atau mungkin bisa jadi juga memang tiketnya mahal *gituloh*. *Nah*, kalau yang saya temui lebih banyak itu saya ambil contohnya di daerah kita sendiri Pak, dulu pernah itu saat maskapai itu ada tiga masuk, Garuda masuk tempat saya itu, kemudian Wing masuk dan Nam masuk, ya. Tapi sekarang tinggal hanya satu maskapai Pak, Wing, itu tiga kali seminggu. *Nah*, yang saya dapatkan keluhan dari masyarakat itu mahal, itu *loh* Pak, tinggi harganya, pasti tinggi karena maskapainya hanya ada satu yang terbang, pasti tidak ada kompetitor, Pak.

*Nah*, persoalan untuk menurunkan harga ini kan jadi masalah, saya rasa ini juga PR kita bersama terkait konektivitas ini, udara ini Pak, persoalannya sekarang kalau dari sisi Kementerian Perhubungan menyiapkan infrastruktur cukup Pak, bandara kita saya pikir cukup, yang jadi masalah *nggak* ada



pesawat yang terbang, ini soal ini. *Nah*, ini barangkali juga nanti disampaikan ke kami, apa kendalanya ini Pak, kenapa *nggak* ada orang mau investasi *nih*, di sektor infrastruktur dan sebenarnya sudah siap, dan semua bandara saya lihat ada petugas dari Kementerian Perhubungan, tapi kenapa maskapai tidak mau terbang *gituloh*. *Nah*, kenapa harganya dianggap sangat mahal oleh masyarakat gitu. *Nah*, orang antara mahal atau tidak mahal ini kan relatif Pak, tapi kalau memang setelah dihitung sangat berbeda dengan ketika mereka menggunakan angkutan lain padahal waktu lebih lama, ini memang kategori mahal Pak, *gituloh*.

Jadi, saya rasa barangkali itu tambahan sebelum ke teman-teman sekalian terkait dengan rapat hari ini. Saya persilakan di sini sudah mendaftar Pak Boyman Harun yang pertama, nanti bersiap-siap Pak Hamid Nur Yasin.

**F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):**

Baik terima kasih,

**Pak Ketua beserta seluruh Pimpinan yang saya hormati,  
Bapak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati,**

Pertama-tama tentu saya apresiasi dengan penyerapan Anggaran 2022 dari Kementerian Perhubungan, tetapi pada hari ini Pak, saya hanya ingin menyampaikan hasil-hasil reses kami, yang menurut saya di Tahun 2023 hampir-hampir tidak kelihatan yang saya sampaikan ataupun yang kami usulkan tentu ini menjadi pertanyaan buat kami.

Yang pertama apa yang disampaikan Ketua tadi itu sangat benar Pak, di daerah kami, armada atau maskapai itu memang sangat terbatas sekarang yang dulunya tiga itu tinggal satu, menurut saya ini tidak sebanding ini Pak, khususnya berkaitan dengan masalah Kabupaten Ketapang atau kabupaten-kabupaten lain yang di Kalimantan Barat, penumpangnya luar biasa, artinya sampai-sampai kita tidak, tidak kebagian tiket kalau kita tidak cepat membeli tiketnya itu, artinya tidak sebanding antara armada yang disiapkan dengan keperluan pengangkutan orang yang akan diangkut.

Yang jadi pertanyaan apakah ini ada trik-trik yang dilakukan oleh maskapai atau armada perusahaan-perusahaan agar harga tiket itu mahal. Biasa-biasanya Pak, kalau di Kabupaten Ketapang itu ke Pontianak itu tiketnya paling mahal itu 600.000, sekarang sudah sampai 1.200.000. Jadi, kalau ke Jakarta lebih murah, dari Pontianak ke Jakarta lebih murah ketimbang ke Ketapang yang hanya 30 menit. Jadi, maksud saya dari Kementerian ini juga harus evaluasi hal apa yang terjadi, sehingga pesawat-pesawat lain tidak masuk terutama berkaitan dengan masalah Putussibau, kemudian Sintang, itu seminggunya tinggal tiga kali, bahkan kadang-kadang tidak terbang gitu. Jadi bandara dibuat tetapi tidak dimanfaatkan, saya pikir itu ruginya berkali-kali, itu yang pertama.

Yang kedua, baik berkaitan dengan masalah Halte Sungai, Pak. Ini saya ulangi lagi Halte Sungai, karena Kalimantan Barat itu kan terkenal dengan

sungai terpanjang, artinya daerah-daerah untuk menghubungkan antara provinsi kabupaten dan kecamatan itu rata-rata itu lewat sungai. *Nah*, sementara alternatif lain kita tidak punya, sama juga dengan masalah bandar udara itu, kalau kayak Ketapang itu, alternatif lain tidak ada harus pesawat, kalau jalan harus 11 jam 12 jam, apalagi sekarang banjir terus putus tidak ada alternatif lain, sehingga mau tidak mau harus naik pesawat walaupun tiketnya mahal. Saya kemarin sudah usulkan beberapa kabupaten di Kalimantan Barat berkaitan dengan Halte Sungai, terutama di Kabupaten Kubu Raya, misalkan di Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Terrentang, Kecamatan Padang Tikar, dan Kecamatan Kubu, itu semuanya transportasinya itu lewat sungai, tetapi saya lihat 2022 ini, halte tersebut saya pikir tidak muncul atau *gimana*, makanya saya tetap pertanyakan, karena ini adalah menurut hasil reses kami yang kami lakukan dan memang ini kenyataan memang prioritas yang harus kita berikan bantuan pembangunan kepada masyarakat, agar masyarakat terbantuan dalam rangka konektivitas dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Jadi, dari Kementerian Perhubungan maksud saya, harus ada juga evaluasi untuk menyeimbangkan keadaan ini *gitu*, keadaan tiket mahal, keadaan pesawat tidak mau masuk, padahal penumpangnya membludak, kemudian persiapan-persiapan sarana dan prasarana bandara, Bandara Ketapang misalkan itu *runway*-nya sudah kurang panjang, perlu diperpanjang, kemudian *terminal* penumpangnya juga menurut saya memang harus dipikirkan sudah tidak layak lagi, tetapi mungkin secara teknis dari Perhubungan juga yang belum siap, sehingga belum dianggarkan untuk direnovasi atau dibangun kembali.

Jadi, saya minta kepada Bapak Menteri, harus ada alternatif kalau seandainya memang armada pesawat tidak bisa dimasukkan tetapi alternatif transportasi laut harus kita pikirkan. Karena daerah kami Pak, di Kalimantan Barat, ini saya khususnya bicara di Kabupaten Ketapang, kalau ke Semarang itu Pak, itu bisa ditempuh dulunya waktu ada ferry-nya 9 jam Pak, 9 jam, dulu kita ada ferry tetapi ferry-nya sudah *nggak* ada, pelabuhannya ada, tetapi armadanya *nggak* ada. *Nah*, dulu kalau ferry-nya ada itu Cisadane namanya Pak, Cisadane nama kapalnya itu 9 jam kalau kita berangkat jam 7 pagi, jam 7 malam, jam 5 pagi subuh itu kita harus udah nyampe di Semarang. *Nah*, sekarang tidak ada lagi ferry-nya, tetapi pelabuhannya sudah ada. Kemudian, kalau ada ferry-nya itu atau kapal cepatnya itu, orang juga *nggak* perlu naik pesawat ke Semarang Pak, atau ke Pangkalan Bun, langsung saja dari Ketapang itu langsung ke Semarang.

Kemudian, dulu di Kabupaten Ketapang juga ada pesawat yang langsung ke Jakarta Pak, yang langsung ke Jakarta, tetapi sekarang pesawatnya sudah tidak ada. Sehingga, yang jadi pertanyaan saya kenapa pesawat-pesawat itu tidak masuk gitu, padahal penumpangnya menurut saya tidak rugi perusahaan, karena penumpangnya ada terus, apalagi di sana kan perusahaan tambang terbesar ada di sana di Kecamatan Kendawangan, kemudian bauksit, perkebunan.

Jadi, yang menjadi pertanyaan saya sekali lagi, tolong dievaluasi kenapa pesawat tidak mau masuk, padahal penumpangnya ada, apakah ini ada

konglikong memang *gitu*, sehingga Wings itu meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, yang biasanya hanya 600 sekarang 1.200.000, 1.100.000, bahkan penerbangan-penerbangan di Kalimantan Barat ke kabupaten-kabupaten lain dikurangi, hanya seminggu sekali atau bahkan tidak ada penerbangan *gitu*, seperti ke tempat Pak Ketua ini kan kalau pakai lewat darat bisa sampai 12 jam-10 jam Pak, apalagi ke Putussibau. Jadi kan sangat menghambat, mengganggu berkaitan dengan masalah kecepatan transportasi, sementara bandara ada dibuat *gitu* Pak, tetapi tidak dimanfaatkan.

Saya pikir itu, Pak Ketua dan Pak Menteri, harapan saya sekali lagi tolong dievaluasi dan tolong setiap hasil reses yang kami sampaikan ini adalah pekerjaan yang kami lakukan di Dapil Pak, jangan sampai reses-reses tetapi kami usulkan tapi tidak diperhatikan, bahkan tidak dianggarkan, sehingga menurut saya percuma juga kita reses, percuma juga kita bertemu dengan seluruh masyarakat yang ada di Dapil kita, tetapi kita tidak bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka untuk memajukan daerahnya dalam rangka konektivitas dan peningkatan ekonomi masyarakat. Saya pikir itu terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Boy. Selanjutnya, Pak Hamid Noor Yasin, bersiap-siap Pak Bakri.

#### **F-PKS (Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.):**

Terima kasih, Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat pagi,  
Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semuanya,

**Yang kami hormati Ketua dan para Pimpinan,  
Segenap Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Pak Menteri beserta segenap jajaran Eksekutif yang saya hormati,**

Pertama, tentu kami mengapresiasi Pak Menteri, atas capaian Kemenhub untuk realisasi anggaran sebesar 75,63%, sedangkan untuk realisasi PNBP Pak Menteri, ini kami mempertanyakan mengapa realisasi PNBP Dirjen KAI hanya 14,79%, ini nanti mohon penjelasan, faktornya apa, kendalanya apa, kemudian masih terkait dengan bidang perkeretaapian.

Sehubungan dengan masuknya pihak swasta dalam bisnis perkeretaapian yaitu kereta api cepat Jakarta-Bandung, yang 40% sahamnya dimiliki asing. Maka kami minta agar Pak Menteri mulai membuat regulasi tarif di Bidang Perkeretaapian seperti halnya regulasi tarif di Bidang Penerbangan, kami minta adanya batas atas dan batas bawah harga tiket kereta api, hal ini diperlukan untuk menjamin adanya persaingan usaha yang sehat Pak Menteri, dan menjamin keberlangsungan usaha kecil dan menengah di bidang

transportasi seperti bus dan juga travel. Sebab berdasarkan informasi termasuk pantauan media, Dirut KCIC memperkirakan harga tiket KCJB ya, paling rendah adalah Rp150.000. Kami menilai harga tiket ini terlalu rendah, sehingga berpotensi mengambil ceruk pasar angkutan bis dan travel yang kini harga tiketnya sekitar 80.000 hingga Rp120.000 dan bahkan ada yang mencapai Rp150.000, bergantung pada tipe layanannya.

Seharusnya Pak Menteri, KCJB ini ditargetkan untuk mengalihkan para pengguna moda pribadi, bukan untuk mencuri pasar pengguna angkutan umum lainnya, apalagi jika angkutan umum tersebut berbasis UMKM, di mana usaha tersebut menyerap banyak tenaga kerja. Jangan sampai untuk menyelamatkan bisnis kereta cepat yang memang dari awal banyak polemik ya, bahkan terkesan ceroboh, kemudian membuat ribuan orang berpotensi kehilangan lapangan pekerjaan, itu beberapa hal yang kami sampaikan Pak Menteri, mohon segera disikapi, sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru dikemudian hari, terima kasih, Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Makasih Pak Hamid. Pak Bakri, silakan.

#### **F-PAN (H. A. BAKRI HM., S.E.):**

**Baik makasih Pak Ketua yang saya hormati,  
Seluruh teman-teman Komisi V,  
Pak Menteri yang saya banggakan yang saya hormati dan seluruh  
jajarannya, makasih.**

Saya mungkin hanya satu poin aja yang *pingin* saya sampaikan ke Pak Menteri, walaupun kemarin saya sudah bersilaturahmi ke tempat Bapak dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat Jambi terkait dengan situasi dan kondisi hari ini di Provinsi Jambi yang lagi viralnya Pak, masalah angkutan batubara. Saya juga perlu menambahkan ke Pak Menteri bahwa penyampaian pesan saya kemarin kepada kawan-kawan *alhamdulillah* sebagian kawan-kawan, termasuk juga saya sudah sampaikan ke Pimpinan mudah-mudahan direspon pada saat nanti kunjungan kerja, kunker Komisi ini mudah-mudahan bisa diarahkan ke Provinsi Jambi. Karena terkait dengan masalah angkutan batubara Pak, angkutan batubara itu betul-betul di Jambi itu Pak Menteri, sudah betul-betul menjadi momok bagi masyarakat, saya takutnya nanti lama-kelamaan ini kalau tidak tertangani, ini akan menjadi anarkis. Oleh sebab itu, ada beberapa fasilitas yang jalur angkutan batubara itu ada jembatan timbang di sana itu. *Nah*, saya *nggak* tahu apakah memang bisa difungsikan atau tidak, karena memang kalau ini memang bisa difungsikan *alhamdulillah* kalau toh memang tidak, ya sayang sekali sudah menggunakan anggaran yang tidak sedikit.

Terus yang berikutnya adalah terkait dengan penerbangan. Memang apa yang disampaikan pembicara terdahulu saudara saya, Pak Boy, sama juga

Pak, kejadian di Provinsi Jambi itu, penumpang membludak terus, tapi penerbangan pesawat ini tidak ada. *Nah*, saya *pingin* coba menyampaikan ke Pak Menteri mungkin salah satu solusi ya, itu Bandara Muara Bungo dan Bandara Kerinci, itu selamanya rutenya itu Jambi, Bungo, Kerinci, *nah*, kalau ini diaktifkan lagi, minimal paling tidak bisa mengurangi kemacetan Pak, karena yang menjadi korban hari ini adalah masyarakat yang kadang-kadang mau bolak-balik ke Jambi. *Nah*, soal tiket memang kita lihat akhir-akhir ini memang jauh tinggi sekali, sebagai contoh umpamanya penerbangan hari ini dari Jambi ke Jakarta itu mencapai 1.400.000, yang dulu harga tiket tidak sampai 1.000.000 Pak. *Nah*, ini juga menjadi pertanyaan, menjadi pemikiran, kami selaku Anggota DPR RI tentu sekarang kadang-kadang mendapat pengaduan daripada masyarakat.

Itu aja mungkin Pak Ketua, jadi intinya saya juga mohon kepada kawan-kawan di Komisi V juga bisa memberi dukungan moril dalam rangka kunjungan kerja nanti bisa diarahkan ke Provinsi Jambi, demikian.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Bakri. Bu Cen Sui Lan.

**F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi V,  
Pak Menteri dan jajarannya,**

Saya langsung saja Pak Menteri, apresiasi untuk realisasi PNBPN udah 90%, tetapi kalau anggaran masih 75% mungkin perlu dipertanyakan. Pak Menteri, melanjutkan pembicaraan teman-teman mengenai penerbangan, saya sampaikan sedikit, di Kabupaten saya, di Bintan, Bintan dengan Tanjung Pinang itu kalau jalan darat hanya setengah jam, tetapi ada desa di Bintan itu namanya Tambelan, itu perlu kalau penerbangan 1 jam, kalau naik kapal 24 jam. Jadi, Pak Menteri bulan Oktober itu subsidi untuk Susi Air sudah habis, *nah*, berarti masyarakat akan mengalami kesulitan. Saya harapkan jangan ada kekosongan jadwal, sehingga subsidi itu setiap tahun habis di bulan-bulan seperti itu, sangat merugikan mereka dan memberatkan. Pertama mungkin tidak ada penerbangan, kedua bagaimana kita membayangkan 24 jam hanya ke Tanjung Pinang, dari namanya Kabupaten Bintan itu ke Tanjung Pinang jalan darat cuma setengah jam, tetapi dengan karena letak geografis menjadi 24 jam naik kapal, apalagi dengan kondisi cuaca seperti ini. Kemarin sudah saya sampaikan juga ke Pak Sekjen, bagaimana solusinya, karena di daerah kami ini memang sangat terisolir, dan untuk konektivitas hanya yang ada seperti itu, kami tidak bisa jalan kaki 10 jam atau apa, desa dengan desa aja hanya di, desa dengan desa saja harus nyebrang laut. Jadi, geografis kami berbeda tolong menjadi perhatian, kita harapkan dapat membantu semua masyarakat yang terisolir, sehingga meningkatkan ekonomi mereka.

Dan, satu lagi Pak Menteri di Lingga, saya juga bicara seperti itu, kami dari desa ke desa harus melewati, melewati laut. Saya mohon Pak Menteri diberikan Roro Mini untuk Gugus Senayang agar konektivitas dan arus barang dan manusia itu bisa diadakan, saat ini mereka hanya punya *pompong* Pak Menteri, tolong dipikirkan diberikan satu Roro Mini. Itu dari saya Pak Menteri tolong menjadi prioritas, terima kasih, terima kasih semua, terima kasih Pak Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Bu Cen Sui Lan. Pak Anwar Hafid silakan, bersiap-siap Pak Djendri.

**F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si.):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat pagi menjelang siang,  
Salam sejahtera buat kita sekalian,

**Yang saya hormati para Pimpinan Komisi V, dan sahabat Komisi V,  
Yang saya muliakan Pak Menteri dan seluruh jajarannya,**

Pertama saya ingin mendapatkan informasi Pak Menteri berkaitan dengan realisasi yang baru 75% ini, mungkin bisa dijelaskan apa saja yang belum dilakukan, apa kendalanya, karena ini sudah berada di penghujung tahun, saya kira kebiasaannya itu mungkin karena pembayaran atau apa, sehingga belum terealisasi 100%, tapi itu mungkin perlu dijelaskan kepada kita Pak Menteri.

*Nah*, yang kedua, saya juga ingin menyampaikan soal PNBK yang capaiannya luar biasa sampai 100% lebih. *Nah*, ini di samping kita apresiasi, juga mungkin perlu dijelaskan kalau sekarang ini belum akhir tahun sudah 100%, kami ingin mendapatkan gambaran, bahwa prospek ke depan ini sangat bagus tentunya. *Nah*, apa yang kira-kira di bagian mana prospek-prospek mana, di bagian mana, sehingga ke depan kita bisa lebih mengoptimalkan, sehingga capainya akan semakin besar.

Yang ketiga Pak Menteri, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan aspirasi Dapil. Saya Anwar Hafid dari Fraksi Partai Demokrat, Dapil Sulawesi Tengah.

Yang pertama, seperti teman-teman tadi sampaikan, kami ingin melaporkan ada beberapa bandara di provinsi Sulawesi Tengah itu, yaitu Bandara Buol, Bandara Tolitoli, dan Bandara Tojo Una-Una, itu yang dibangun dengan anggaran yang sangat besar, tapi hari ini pasca covid tidak ada yang beroperasi. Sementara jangkauan kabupaten ini Pak Menteri, cukup jauh, Kabupaten Buol itu berbatasan dengan provinsi Gorontalo, dari Gorontalo 8 jam, dari Palu itu kurang lebih sekitar 17 jam perjalanan darat, kemudian juga Kabupaten Tolitoli seperti itu. Kabupaten Tojo Una-Una dari Palu menuju

kabupaten ini kurang lebih sekitar 12 jam. Daerah-daerah ini Pak Menteri adalah satu daerah yang di Sulawesi Tengah merupakan daerah yang sangat di daerah tertinggal, *nah* salah satu persoalannya mungkin karena persoalan transportasi ini. Jadi, kami mohon solusi dari Pak Menteri kira-kira apa yang harus dilakukan, sehingga bandara ini bisa kembali kita fungsikan, penerbangan-penerbangan perintis itu mungkin menjadi alternatif, sehingga bandara, bandara yang sudah menelan anggaran negara yang cukup besar ini bisa termanfaatkan dengan baik.

*Nah*, yang keempat Pak Menteri, soal tol laut. Saya kira ini hal yang sangat menggembirakan, karena memang kita melihat sendiri daerah-daerah terjauh, terluar, ini tol laut sangat membantu dalam rangka memberikan kemudahan sekaligus bagi upaya Pemerintah menekan harga. Oleh karena itu saya hanya ingin menyampaikan Pak Menteri, ada beberapa sarana dan prasarana yang saya lihat di Dapil saya, yang mungkin perlu diperbaiki, ditingkatkan, sehingga kita berharap ke depan, tol laut ini akan terus dilanjutkan, karena ini sangat membantu dan sangat berguna bagi kemajuan daerah-daerah yang terluar, terpencil, terbelakang tersebut.

*Nah*, yang terakhir Pak Menteri, saya ingin melaporkan, ada salah satu bandara di Provinsi Sulawesi Tengah itu Bandara Morowali. Pak Menteri dulu yang resmikan di sana, itu terbalik dengan apa yang saya laporkan tadi, bandara ini kecil tapi sehari itu bisa sampai 5 kali penerbangan Pak Menteri, sangat padat, karena di sana ada tiga kawasan industri *smelter* yang sangat besar, mungkin saya ingin harapkan di Tahun 2023 ke depan Pak Menteri, sudah dipikirkan agar bandara ini bisa ditingkatkan, bandara apa, landasannya bisa lebih diperpanjang, sehingga tidak lagi pesawat-pesawat kecil seperti hari ini yang sampai 5 kali *flight* setiap hari dari Makassar ke Morowali. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih.

*Allahul musta'an,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Anwar Hafid. Pak Djendri silakan, bersiap-siap Pak Sudewo.

**F-PDIP (DJENRI ALTING KEINTJEM, SH, M.H.):**

Terima kasih atas kesempatan.

**Pimpinan Komisi yang kami hormati,  
Kementerian, Rapat kerja yang kami hormati,**

Kemarin saya didatangi oleh perwakilan pemerintah di Sulawesi Utara, juga ketemu dengan Pak Ketua Komisi. Memang hari ini kita konsentrasinya bicara tentang evaluasi, tetapi ini harus saya sampaikan, karena menurut program pemerintah untuk tujuan wisata di Indonesia ini ada lima tempat yang ditetapkan sebagai prioritas, Mandalika, Toba, dan lain sebagainya dan

Sulawesi Utara, itu urutan kelima. Pak Gubernur ternyata sudah pernah menyurat ke pihak Kementerian untuk hal ini, tetapi dalam gambaran program kerja lima prioritas itu ternyata untuk Tahun 2023 nanti, Pak Menteri, walaupun ini kita bicara tentang evaluasi, ternyata kayaknya ini seperti surga telinga aja, atau *lip service*. Karena ternyata untuk 2023, Ka-Balai kita diundang datang di Banggar dan pihak Perhubungannya diundang datang, ternyata anggaran untuk itu yang menjadi prioritas nasional di lima ini termasuk Sulawesi Utara, kita hanya dapat sebagian rehabilitasi pelabuhan kecil yang ada di Likupang. Sehingga, saya ditugaskan Pak Gubernur itu untuk menyampaikan langsung ke pihak Menteri, bahkan sebentar ada surat yang dikirim Pak Gubernur, mungkin saya akan serahkan ke pihak Menteri, ini untuk ditindaklanjuti, agar supaya benar-benar lima prioritas ini jangan seakan-akan yang empat aja yang prioritas, yang satu *ndak*, sehingga yang satu seperti Pak Gubernur bilang, anak tiri mungkin.

Saya minta Pak Menteri itu untuk ditindaklanjuti dan kemarin juga sudah ketemu dengan, dengan Ketua Komisi kita. Mungkin Pak Ketua, ini yang bisa saya sampaikan hari ini, sekaligus sebentar saya akan menyerahkan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur kita, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Silakan Pak Djenri, serahkan sekarang, silakan, mau diserahkan. Nanti saja?

**F-PDIP (DJENRI ALTING KEINTJEM, SH, MH):**

Oke baik nanti saja.

**KETUA RAPAT:**

Ya betul, Pak Menteri kemarin saya ditemui Kepala Balai sana bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara, nanti lebih jelas Pak Djenri yang akan sampaikan, mohon diatensi.

Selanjutnya Pak Sudewo, keluar, saya persilakan dulu Pak, Ibu Sri Rahayu.

**F-PDIP (SRI RAHAYU):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pimpinan Anggota Komisi V yang saya hormati, dan Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang dihormati,**

Saya hanya tiga poin.



Yang pertama kami, kami mengusulkan, saya mengusulkan Pak Pimpinan dan Pak Menteri terkait dengan bandara situasinya maupun apapun yang terkait dengan bandara, baik bandara perintis, bandara yang domestik maupun yang internasional, menurut saya ini perlu dibuatkan panja Pak Ketua, sehingga ketika kita akan mau *ngapain* bandara yang perintis, yang udah *nggak* bisa dipakai atau mungkin *nggak* dipakai karena alasan apapun, dan jumlah bandara di Indonesia ini banyak banget *loh*, sehingga ketika kita mau meningkatkan maupun mau membangun bandara baru itu hitungannya *real*, tidak hanya sekedar usulan, tetapi memang ada secara komprehensif termasuk apa yang disampaikan Pak Ketua merupakan bandara koneksitas dan seterusnya, itu menjadi sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan dan apa, situasinya memang bisa ditindaklanjuti, karena saya ambil contoh Pak, misalkan sekarang ini terkait juga karena adanya tol, yang memang mungkin masyarakat di Jawa ini nyaman dengan menggunakan jalan tol, sehingga naik menggunakan darat, Surabaya-Solo, Surabaya-Semarang, Surabaya-Jogja, itu sekarang *nggak* ada penerbangan yang *direct* itu, semuanya lewatnya Jakarta semua ini, *nah* ini kan perlu juga menjadi perhatian kita semua begitu.

Kemudian yang kedua, saya juga ingin penjelasan kalau di dalam penyajian Bapak halaman 6, itu kan yang pertama memang ada yang sudah 144% melampaui, kemudian yang kedua, izin itu realisasinya ada tetapi targetnya *nggak* ada itu apa maksudnya gitu, saya minta penjelasan itu, termasuk di dalamnya adalah Balitbang ya, targetnya, realisasinya ada sampai dengan November, tapi targetnya 2022 ini *ndak* ada, kemudian prokestasinya sehingga *nggak* ada, saya mohon penjelasan. Dan, mungkin juga *real*, apa sisa anggaran-sisa anggaran itu memang perlu disampaikan kepada kita secara utuh Pak, sehingga kita juga barangkali ada program-program yang memang belum kesampaian dianggarkan, itu bisa diarahkan ke sana, meskipun Pak Menteri sudah juga menyampaikan hal tersebut.

Kemudian yang ketiga terkait dengan ini Pak, saya membaca berita apa, asuransi untuk korban Lion ya, yang ada masalah itu, yang masuk ke dalam ACT itu, lalu kira-kira sejauh mana ini peran dari Kementerian Perhubungan untuk hal tersebut, karena informasinya kan tidak sampai secara utuh kepada korban ini, mohon informasinya Pak, angkanya tidak sedikit ini, selain juga angkanya, artinya korban ini kan dirugikan untuk hal tersebut, komunikasinya seperti apa itu.

Dan, saya selalu sampaikan yang terakhir Pak, tentang tarif antara tarif biasa dengan tarif apa, bisnis, kan informasinya paling tinggi 300% ya, informasi yang saya dengar dari Kementerian Perhubungan, tapi kenyataannya kan tidak demikian lebih dari 300%. *Nah*, ini langkah-langkahnya dari kementerian seperti apa begitu, karena kalau Garuda misalnya 1,6, itu kalau dikalikan 3 kan 4,8 ya, itu kalau bisnis sudah 5 juta setengah, 5.500.000 dan seterusnya, artinya lebih dari 300%, mohon ini juga mendapatkan perhatian, terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Bu Sri Rahayu.

Pak Menteri saya sebentar dulu, memang terkait dengan Sriwijaya, Pak. Saya kemarin sudah menerima, karena ini dari Dapil saya Kalimantan Barat, menerima keluarga-keluarga korban perwakilan ya, sudah disampaikan kepada kami, waktu kita rapat di sini, saya ada tanya berulang-ulang kepada Sriwijaya, apakah mereka sudah mengurus semua, jawabannya semua kita urus, kecuali yang masih ada hambatan soal ahli waris. Kita pertanyakan lagi soal ada *nggak* varian baru yang diterapkan aturan oleh Sriwijaya contoh, seperti dulu Lion, yang menerapkan bahwa tidak akan menuntut pihak manapun, *nggak* ada, mereka tidak buat aturan itu, saya berulang-ulang kali tanya. Rupanya di perjanjiannya itu ada Pak, disyaratkan itu, *nah*, yang tidak mau tanda tangan terkait dengan syarat itu belum dibayarkan sampai sekarang.

Yang saya maksudkan, kenapa Sriwijaya itu berbeda bicaranya di ruangan rapat ini dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh Sriwijaya, ini mohon atensi Pak Menteri, ini saya pesan juga sekalian kalau memang bisa diselesaikan melalui Kementerian, kami minta ini segera diselesaikan, ini kita tidak perlu panggil lagi. Tapi kalau memang nanti tidak selesai, ya kami akan panggil lagi sebagai tindak lanjut laporan daripada keluarga korban ini, karena menurut saya, Sriwijaya menyampaikan hal yang berbeda kepada forum rapat yang dihadiri oleh kita semua pada waktu itu, dengan yang dilaksanakannya terkait dengan penyelesaian santunan kepada para korban.

Jadi demikian Pak Menteri, mudah-mudahan ini bisa Pak Menteri selesaikan saja di sana, jadi sehingga kita tidak perlu lagi panggil untuk rapat di sini, tapi manakala tidak diselesaikan, atau belum bisa diselesaikan, kami akan panggil kembali Sriwijaya yang kemungkinan juga nanti kita akan hadirkan keluarga korban, biar kita konfrontir aja di ruangan ini. Jadi, saya rasa demikian barangkali Pak Menteri terkait yang Sriwijaya, saya hanya menambahkan itu saja, selanjutnya saya persilakan Pak Sigit Sosiantomo.

## **F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi V,  
Kami hormati Pak Menteri Perhubungan dan segenap jajarannya,**

Ada dua atau tiga ya, yang ingin saya tanyakan.

Yang pertama begini, terkait dengan target realisasi PNBP, tentu kita apresiasi yang, yang melebihi target *nih*. Cuma pertanyaannya adalah apakah ada korelasi antara tol laut dengan target PNBP Dirjen Hubla Pak Menteri, apakah lebihnya ini sebagian dari prestasi tol laut, ya, atau justru sebaliknya, tol laut itu kan membutuhkan subsidi banyak, tapi PNBP-nya jadi besar gitu, atau jangan-jangan jawabannya, jangan takut memberikan subsidi kepada apa

namanya angkutan umum, karena baliknya juga akan besar seperti ini gitu, kira-kira begitu. *Nah*, kami butuh penjelasan, karena ini menyangkut kebijakan selanjutnya gitu, banyak sekali yang mengkritisi tol laut yang kurang berhasil bahkan gagal dan seterusnya, tetapi justru di sini Pak Menteri menyajikan kepada kami, PNBP dari Dirjen Hubla yang paling tinggi, perlu penjelasan Pak Menteri.

Yang kedua KA, kereta api ini. Kereta api ini sangat kecil ya, sementara kita tahu bahwa animo masyarakat terhadap kereta api ini terus membesar, terus besar-terus besar, dan sekarang jalur ganda *double track* itu sudah hampir mencapai, hampir tuntaslah, hampir Jakarta-Surabaya, tentu itu akan memperbesar PNBP ya. Jadi, pertanyaannya adalah kenapa kereta api ini jauh sekali masih dari realisasi, antara realisasi dengan target masih jauh.

Saya kira itu dua pertanyaan terkait realisasi PNBP, saya tidak tahu, ini Pak Menteri pada kesempatan ini betul-betul sepertinya memfokuskan pada realisasi PNBP, laporannya ini. Mungkin Pak Menteri ingin mengatakan bahwa, kami ada prestasi dengan kenaikan PNBP Tahun 2022, kami gembira, tetapi tentu harus ada penjelasan-penjelasan lebih lanjut.

Terakhir, terkait dengan kunjungan-kunjungan kerja DPR. Kunjungan-kunjungan kerja DPR ini kan bukan semata-mata jalan-jalan untuk melihat fakta di lapangan, tetapi kunjungan ini tentu memiliki dampak perencanaan ke depan, beberapa di antara bandara yang kita kunjungi seperti Kertajati atau seperti bandara di daerah Pati sana itu, itu perlu bagaimana ke depan ini, perlu sebuah perencanaan yang matang, maksud saya yang perencanaan yang bisa dipegang begitu Pak Menteri, lalu bagaimana dengan bandara-bandara yang sudah dibangun ya dengan berbagai kriteria, dengan berbagai ukuran ya, yang begitu *rigid*, tapi sekali lagi belum ada maskapai yang menerbanginya ya. Jadi, pertanyaan besarnya adalah bagaimana perencanaan ke depan, kalau tahun ini tentu sudah tidak bisa lagi, kita tinggal satu bulan ini, lalu ke depan bagaimana.

Saya kira tiga pertanyaan itu yang menjadi *concern* kami, melihat laporan Pak Menteri yang disajikan kepada Anggota Komisi V pada hari ini, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Pak Sigit terima kasih, sebentar, putar giliran dulu Pak, Mas Dewo mau diambil tetap, *nggak* jadi ya?

**F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Waktunya yang kurang.

**KETUA RAPAT:**

*Nggak jadi ya? Jadi, oh silakan Mas.*

**F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Mohon maaf tadi ada hal yang mendesak di luar, langsung saja.

Pak Menteri meskipun progres keuangan dan fisik masih jauh dari target, tapi saya yakin di Kementerian Perhubungan mampu menyelesaikan secara baik pada saat final nanti, karena Kementerian Perhubungan sudah teruji kinerjanya, bahwa tidak pernah pada akhir tahun itu sampai meleset, pasti sesuai dengan target. Jadi, saya optimis, saya dukung Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka pencapaian target itu.

Tapi persoalannya, dalam konteks kinerja dan kewenangan Kementerian Perhubungan, itu tidak hanya sebatas bagaimana merealisasikan keuangan dan merealisasikan fisiknya saja, karena Kementerian Perhubungan ini lebih kompleks, tupoksinya itu dan perannya itu sangat kompleks jika dibandingkan dengan kementerian yang lain, yaitu bagaimana Kementerian Perhubungan dihadapkan pada satu tantangan transportasi darat, laut, dan udara, supaya bisa menjadi lebih lancar, supaya *cost* logistiknya menjadi lebih murah, supaya bisa memberikan azas keadilan kepada masyarakat dan pemerataan pembangunan, itu adalah peran Kementerian Perhubungan.

Maka bicara soal Anggaran Tahun 2022, tentu tidak bisa kita pisahkan dengan satu realita, realita di lapangan, misalnya terkait dengan kemacetan lalu lintas yang begitu parah di provinsi Jambi, akibat dari transportasi batubara, angkutan batubara. Ini mohon maaf kawan yang ada di sana, saya terpaksa bicara, karena ini sudah dalam konteks nasional dan teman-teman, saudara-saudara saya juga banyak yang ada di sana, saya juga sering mendapatkan keluhan dari, dari sana.

Saya percaya bahwa kemacetan transportasi yang begitu parah di Provinsi Jambi ini, tidak hanya menjadi kewenangannya Kementerian Perhubungan untuk mengatasi ini, ada instansi-instansi lain, kementerian-kementerian yang lain yang harus dikoordinir secara komprehensif dan sinergis dalam hal mengatasi persoalan ini, tetapi *leading* sektornya tetap di Kementerian Perhubungan ya, maka saya ingin mendapatkan satu pencerahan, bagaimana upaya atau langkah-langkah konkrit yang sudah dilakukan Kementerian Perhubungan termasuk juga perencanaan ke depan, apa yang akan dilakukan untuk mengatasi hal ini. Karena akibat daripada kemacetan lalu lintas yang ada di Jambi, itu dampaknya adalah secara nasional, dampak hal apa ini, dampak hal perekonomiannya. *Nah*, bagaimana mengatasi hal ini, semua pihak itu tidak ada yang merasa dirugikan sebagai *win-win solution*, apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, jadi saya ingin mendapatkan satu pencerahan.

Yang kedua, soal sering terjadinya kecelakaan lalu lintas, utamanya kecelakaan lalu lintas darat, Pak. Di kampung saya kemarin, kira-kira baru tiga hari yang lalu, di Kabupaten Wonogiri itu juga menelan korban delapan orang meninggal, akibat kecelakaan bis, itu coba disebabkan oleh apa, KNKT sudah melakukan investigasi atau belum, dan rekomendasi dari hasil kerja KNKT ini dijadikan satu dasar acuan untuk menyusun kebijakan atau tidak, dijadikan dasar atau acuan untuk menyusun program, ya, terkait dengan penyusunan atau postur anggaran oleh Kementerian Perhubungan atau tidak. Jadi, postur anggaran kebijakan fiskal dari Kementerian Perhubungan itu mencerminkan solusi dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di lapangan atau tidak, begitu ya.

Jadi, kalau itu sudah menggambarkan sebagai solusi, pemecahan masalah dari kejadian-kejadian di lapangan, karena kemacetan lalu lintas, karena kecelakaan lalu lintas, ya, karena ketidakadilan, itu ada satu pemecahan masalah yang tercermin dalam kebijakan fiskal Kementerian Perhubungan dalam program-programnya itu atau tidak, ya. Kalau itu belum ya masih ada kesempatan kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian.

Selain itu juga, manajemen itu perlu ditingkatkan, koordinasi dengan instansi lain, yang lain itu ditingkatkan. Bagaimana juga pembinaan Kementerian Perhubungan terhadap *stakeholder* yang terkait dengan transportasi, baik itu transportasi darat, laut, maupun udara, pembinaannya sejauh mana, ya, misalnya terhadap organda, angkutan, penumpang itu sejauh mana kepatuhan mereka terhadap perizinan, sejauh mana mereka terhadap kelengkapan atau kondisi fisik, kelaikan teknis kendaraannya, itu sejauh mana, misalnya semacam ini, ini terkait dengan manajemen.

Jadi, Menteri Perhubungan itu memang bobotnya sangat besar, tidak hanya masalah bagaimana melaksanakan program-program yang bersifat fisik, jadi memang dituntut punya ilmu yang tinggi, dituntut punya seni yang tinggi, artinya punya *leadership* yang tinggi gitu, dan saya percaya dengan Pak Menteri sekarang ini, itu memang mampu, itu saya melihat dengan kinerjanya, hanya karena mungkin persoalan dan kompleksitas masalah yang dihadapi di lapangan, baik itu transportasi darat, laut, udara itu sangat tinggi, masih ada celah-celah, masih ada percikan-percikan yang itu menjadi dinamika di lapangan. Saya hanya ingin mengingatkan itu saja kepada Pak Menteri, supaya masalah-masalah di lapangan itu bisa diatasi, terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Mas Dewo. Selanjutnya Pak Fauzi, bersiap-siap Pak Syarif.

**F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):**

Makasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Bapak Ketua dan para Wakil Ketua, teman-teman Komisi V,  
Pak Menteri dan Bapak-Bapak sekalian dari Kementerian Perhubungan,**

Saya singkat-singkat aja Pak, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin saya lebih banyak di luar konteks yang sedang dibicarakan Pak, karena saya tadi agak terlambat datang.

Yang pertama, saya ingin mengetahui Pak, sejauh mana Kementerian Perhubungan mempersiapkan segala sesuatunya secara umum saja Pak, dalam rangka Natal dan Tahun Baru, Pak.

Yang kedua, saya juga ingin mendapatkan informasi Pak, kalau saya mungkin sudah disampaikan tapi saya belum membaca di media ya, atau memang belum, belum lama ini terjadi kecelakaan Pak, ya, kebakaran kapal Mutiara Timur 1, rute Ketapang-Lombok, terbakar di perairan Bali, Pak. *Nah*, di sana berita yang saya baca belum disebutkan sebab musabab daripada kapal yang terbakar tersebut, Pak.

Kemudian yang ketiga, ya, saya ingin mengetahui Pak, kira-kira bagaimana kereta SulseL ini Pak, janjinya tahun ini selesai Pak, kemarin baru diresmikan, baru separuh rute cuman itu Pak, entah diresmikan entah apa, tapi sayangnya kami dari Komisi V tidak ada yang, tidak ada yang diundang atau tidak ada yang datang Pak, kalau saya undangannya *nggak* ada gitu, kesan itu, kesan itu menjadi program provinsi gitu Pak, kita *nggak* ada yang hadir satu juga Pak, gitu, rute Barru-Parepare kalau tidak salah, masih ada separuh lagi dari Makassar satu itu Pak. *Nah*, ini saya ingin mengetahui progresnya sejauh mana.

Kemudian yang keempat Pak, kalau tidak salah saya lupa saya sayang tidak mencatat Pak, ya, ada survei dari lembaga survei tentang maskapai penerbangan yang berhubungan dengan apa ya, tentang bagasi Pak, dan pokoknya maskapai penerbanganlah Pak, ya yang disurvei, ada lima maskapai penerbangan yang dianggap buruk pelayanannya Pak, dua ada di Indonesia Pak. Satu, Lion Air, kalau tidak, kedua apa, bukan Air Asia, yang anak perusahaannya Garuda itu apa Pak, Citilink. *Nah*, saya ingin mengetahui ini Pak, bagaimana tanggapan Pak Menteri terhadap survei itu. Karena survei itu sebenarnya ya bisa benar, bisa tidak, tapi kalau kami merasakan ya kenyataannya begitu Pak, gitu. Dua maskapai penerbangan ini kalau bicara pelayanan sangat memprihatinkan, bahkan sudah menjadi kebiasaan, apa, kebiasaan atau rutin yang namanya *delay* itu Pak, dan *delay*-nya tidak main-main, cukup lama, dan sudah *delay*, *oh* sama dengan Batik ya Bu ya, sudah di-*delay*, tapi kita juga tidak apa penumpang tidak mendapatkan apa-apa, padahal dua jam setelah *delay*, harusnya kan harus ada *service* lah bagi pelayanan. *Nah*, ini juga perlu disosialisasikan Pak, hak daripada penumpang pada saat survei dua, lebih dari dua jam sudah mendapatkan segala sesuatunya yang memang diatur oleh aturan gitu, Pak.

Kemudian yang berikutnya, saya ingin mengetahui Pak, saya sangat senang Pak, ya dengar berita Kertajati sudah dipakai untuk pemberangkatan Umroh, tapi mungkin akan lebih lengkap Pak, mungkin, atau sudah disampaikan Pak ya, karena saya terlambat, sudah rutin atau belum, satu hari misalkan berapa gitu, ini kan nanti coba kita studi komparatifkan dengan luas bandara gitu, ini sudah maksimal atau belum, kalau belum bagaimana memaksimalkannya.

Yang terakhir Pak, ya terus terang saja Pak, saya, mungkin teman-teman Komisi VII, eh Komisi V Pak, apa, mengapresiasi Pak, Bapak terhadap kami yang ada di Komisi V ini dengan Tahun 2023 membuka ruang, apa, memperhatikan Undang-Undang MD3 itu Pak, gitu ya, tapi sekedar diinformasikan Pak, boleh katakan mungkin hampir 60-70% tidak ada di Dapil kami Pak, gitu, ya karena alasannya perencanaan, Pak. Nah jadi, yang tadinya gitu, gitu, hampir 60% gitu, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Tadi tadi udah kita bahas Pak, supaya Bapak tidak perlu diperpanjang.

**F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):**

Oke kalau gitu, saya belum.

**KETUA RAPAT:**

Udah *clear* ya.

**F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):**

Gitu.

**KETUA RAPAT:**

Lanjut tanya-tanya ke Kapoksi ya, baik supaya tidak diperpanjang.

**F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):**

Oke.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):**

Apa yang apa, cukup.

**KETUA RAPAT:**

Cukup Pak, cukup.

**F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):**

Oke cukup kalau begitu, makasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya makasih Pak Fauzi. Baik selanjutnya, Pak Syarif Alkadrie, bersiap-siap Pak Eddy Santana.

**F-P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang dan salam sejahtera,

**Yang saya hormati Ketua Komisi V beserta seluruh Pimpinan,  
Bapak Menteri serta seluruh jajaran Kementerian Perhubungan,  
Teman-teman sejawat Anggota Komisi V yang saya hormati,**

Pertama saya menyampaikan apresiasi, ya jadi tidak salah juga Pak BNPP Perhubungan kita naikan pada waktu itu, ternyata sekarang sudah mencapai satu persen, ya mudah-mudahan bisa lebih, karena ini kan masih bulan November ya.

Yang kedua berkaitan dengan realisasi pelaksanaan. Saya kira 75% ini kan baru penyerapannya, dan sedang berjalan, jadi sebenarnya udah *nggak* ada masalah sebenarnya 75% itu, selalu dari, dari lihat dari sisi serapan ya, mungkin pencairannya kan.

Kemudian, saya memperkuat juga apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi V tadi, berkaitan dengan masalah tragedi Sriwijaya, ini saya kira perlu ini Pak, karena memang ada beberapa yang kemarin mungkin di menghadap ke Ketua Komisi berkaitan memang hak-hak mereka belum diterima. Saya kira ini harus diutamakan dari sisi kemanusiaanlah, saya berharap betul kepada Kementerian Perhubungan untuk menuntaskan persoalan ini. Karena ini tentu mereka sudah tertimpa musibah, kemudian juga yang menjadi hak mereka tidak bisa mereka terima gitu, ini tentu sangat miris bagi kita.

Kemudian berkaitan dengan ini Pak, saya mohon benar ini berkaitan dengan regulasi, terutama penerbangan-penerbangan perintis. Saya kemarin ini, ini juga tentunya kepastian, tapi kita sebenarnya berharap, yang berkaitan dengan masalah harga tiket, kan sulit juga untuk kita inikan dengan peningkatan harga avtur, tetapi yang harus menjadi itu kan harus konsisten, dan ini saya terima sendiri gitu, saya akan pergi pada waktu itu ke Kapuas Hulu Pak Ketua, kebetulan acara Pramuka saya sebagai Ketua Kwarda harus apel



di sana, acara pramuka. Kemudian kita sudah beli tiket, *eh* besoknya mau berangkat, tau-tau hari ini dibatalin, Bapak kan tahu Pak, berapa jarak antara Pontianak ke Kapuas Hulu, dan saya waktu itu juga dengan Pak Wagub, akhirnya apa, kita harus memutuskan harus lewat darat dalam tempo waktu yang cukup jauh *gitu*, padahal besok sudah akan upacara jam 08.00.

*Nah*, ini kan sudah sangat menyiksakan dan juga mungkin, ya Tuhan beri petunjuk yang kena Anggota Komisi V dengan pejabat pemerintah daerah, jadi merasakan bagaimana kalau masyarakat yang lain. Ini, udah *gitu* Pak, setelah itu okelah setelah ini besoknya saya akan pulang lewat Sintang, saya harus hari itu harus juga mengejar rapat di sini, saya pikir sampai Sintang sampai Jakarta langsung ke sini, kenyataannya apa, sampai ke Sintang begitu juga, pesawat tidak diberangkatkan, akhirnya kita naik darat lagi, rencana semua sudah tidak bisa dilaksanakan, kemudian juga tentu makan waktu. Ini saya kira perlulah *Airline* kita ini betul-betul saya, apa, komitmen disiplin di dalam melaksanakan terhadap apa, usahanya ini *gitu*, artinya jangan mengorbankan masyarakat, ya kalau masalah harga ya, kita bisa tidak, ya, juga kita harus memaklumi dengan kondisi yang ada, tetapi paling tidak kan ada kepastian itu, jadi saya kira ini yang sangat penting.

Kemudian, berkaitan dengan ini saya juga melihat ada beberapa mungkin sebagai, ini kita kan sudah Tahun 2023, 2024 ya, secara konstitusi ada apa pemilihan Pileg dan maupun Pilpres, mungkin ini beberapa yang harus menjadi catatan, aduh, yang harus juga Pak, mungkin saya cuma sekedar menyampaikan saran yang perlu menjadi diinventarisir berkaitan dengan beberapa yang mungkin sekarang harus kita waspadai ya, berkaitan dengan beberapa program-program yang harus kita tuntaskan di 2024, kalau tidak, bisa jadi satu proyek yang mangkrak.

Kemudian selain itu ya tentu tadi berkaitan dengan kereta cepat, yang sekarang ini kan sudah dibiayai, udah masuk APBN ini Pak, jadi pihak dari yang semula *B to B* jadi sekarang masuknya kepada pemerintah, saya kira ini perlu juga harus diperjelas, walaupun sebenarnya kita di sini regulasinya, karena ini kaitannya dengan udah BUMN, tetapi secara regulasi kan tetap di kita Pak, kaitan dengan ini.

*Nah*, kemudian berkaitan dengan operasional Pelabuhan Patimban itu. Itu kan perlu juga kita dorong, selain dari Kertajati.

*Nah*, lantas berkaitan dengan Dapil, saya kira saya kembali lagi berkaitan dengan ini karena pemerintahan daerahnya menyampaikan ke kita berkaitan dengan kelanjutan masalah pembangunan Bandara Kayong itu, realisasinya sampai saat ini juga perlu kami ketahui, karena di sana juga sudah melakukan pembebasan terhadap lahan-lahan yang telah menjadi kewajiban itu.

Mungkin ini beberapa yang kami sampaikan di dalam kesempatan ini atas segala capaian-capaian yang sudah dicapai oleh Kementerian Perhubungan ini, ya saya menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya, sekian saya akhiri.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq.  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Syarief, selamat menikmati perjalanan panjangnya Pak. *Nih*, kalau dari Pontianak ke Putussibau itu memang tidak menikmati Pak, sudah masuk kategori penyiksaan itu, ya mesti hampir 20 jam itu perjalanan.

Jadi, Pak Syarief dalam dua hari menempuh perjalanan mobil hampir 40 jam, luar biasa. Itulah situasi hari ini mudah-mudahan Pak Menteri memang ini kendala kita Pak, saya lihat juga bandara kita di mana-mana bagus ya, kan masif kita bikin bandara berapa tahun terakhir. *Nah*, jaman Pak BKS-nya berapa banyak bandara kita bikin, diresmikan oleh Presiden, tapi *nggak* ada pesawatnya, Pak. Apa masalah bisnis angkutan udara tidak menarik di republik ini, ya kan, dulu kita sayang-sayang Merpati *collapse*, dulu Merpati kan mainnya di sektor sini, ada Kalstar dulu *collapse* juga, sekarang tinggallah si, si apa nama Lion Group, karena Garuda juga udah *nggak* ada ATR-nya, Citilink setahu saya juga, *nggak*, masih ada *nggak* nih ATR nih Citilink, masih ada ya, tapi *nggak* ada terbang nih, minimlah, tidak menyelesaikan masalah.

Ini memang perlu dikaji juga, kita pengen tahu juga nih Pak Menteri, kenapa bisnis ini menjadi tidak menarik ya, sehingga banyak bandara yang sudah kita bangun tidak bisa di, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Baik terima kasih, selanjutnya Pak Eddy Santana, bersiap-siap Ibu Novita.

**F-P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.);**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan Komisi V yang saya hormati dan beserta teman-teman Anggota Komisi V DPR RI,**

Pak Menteri, maaf Pak, saya agak ke belakang, tadi datang *zoom* dulu tadi sebelumnya ini Pak, beserta seluruh jajaran Eselon I dan semuanya ya.

Pertama, langsung saja saya mengenai Bandara Silampari Pak, terima kasih Pak Menteri. Jadi, sudah tadi banyak keluhan tidak ada yang terbang, Silampari sudah terbang lagi Pak, dan kita sama-sama kemarin itu diundang saya ya, tapi hanya dari dua penerbangan dulu sebelum covid, sekarang hanya satu dan itu tidak setiap hari. Saya mendengar bahwa di situ untuk membeli tiket sudah antrian juga, apakah betul itu gitu, kalau betul berarti ditambah *dong* harinya gitu, tidak seminggu 4 kali atau 3 kali, jadi setiap hari gitu. *Nah* ini, dan juga sudah ada anggaran untuk pelebaran apron gitu ya, tambahan itu, yang tadi sudah, apa sebelumnya juga sudah sudah disetujui oleh (suara kurang jelas) itu, tapi masih kurang itu, jadi sekitar 30 kalau *nggak* salah, 30 Miliar, tapi kebutuhan sendiri 50-an itu.

*Nah*, yang kedua Bandara Atung Bungsu, Pak, Atung Bungsu Pagar Alam, Pak Menteri, itu saya mendengar juga ada informasi sudah tender, tapi anggarannya belum tersedia, lebih kurang 20 Miliar, *nah* ini kenapa itu kurang, sedangkan tadi ada pergeseran kan sisa lebih anggaran bisa-bisa masuk ke sana juga barangkali, mohon ini juga diperhatikan itu.

Dan, kemudian yang ketiga Bandara Kertajati Pak, ini menjadi atensi kita semua, tapi ini terima kasih sudah mulai gitu, untuk khusus Umroh ya, mudah-mudahan itu terus, terus dipakai tidak hanya seremonial sekali saja, tapi terus gitu, kalau perlu nanti kami Umroh lewat situ Pak, *insya Allah*.

*Nah*, yang selanjutnya Pak, itu mengenai Pendapatan Negara Bukan Pajak. Tadi disampaikan bahwa yang terbesar adalah dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, *nah*, ini di mana Pak yang terbesar ini kalau boleh tahu di mana dan di apa ini, program apa, apakah ini ada di terminal gitu, terminal khusus atau terminal umum, atau pelabuhan gitu, *nah*, ini-ini nih mohon penjelasan lebih rinci masalah ini, kalau ini kan senang saja kita, *wah* bertambah lagi *nih* pendapatan gitu, kalau perlu diperbanyak, kalau di Tersus, Terum atau Tersus jadi Terum gitu kan, kalau Tersus kan misalnya ada IUP batubara hanya satu gitu kan, khusus untuk si pemegang IUP, tapi kalau Terum bisa dari mana-mana gitu, *nah*, ini sedangkan kalau satu saja gitu, Tersus itu, ya banyak nganggurnya gitu, terminal khusus itu, setelah ada *loading*, tapi banyak jam yang yang kosong gitu, lebih baik dijadikan terminal umum itu, bisa dari mana-mana.

*Nah*, kemudian yang selanjutnya, saya kira ada banyak keluhan Pak, di KSOP Pak, di KSOP, saya tidak perlu sampaikan di sini juga, nanti secara khusus ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan gitu ya, *nah*, ini nanti langsung saja tolong dengan Dirjen, Pak Dirjen mana ya, Perhubungan Laut, kalau *ndak* salah sudah beberapa surat juga saya sampaikan gitu ya. *Nah*, ini belum ada jawaban, tapi nanti secara khusus bisa fasilitasi perlu bicarakan, saya mohon izin Pak Pimpinan, gitu ya.

Terima kasih. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, saya mohon maaf kalau ada kekurangan.

*Wabillahi taufiq wal hidayah.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Eddy Santana dari *Wong Kito Galo* juga ini, rupanya Pak Eddy Santana ini dulu pernah jadi Ketua DPD PDI-Perjuangan Pak, baru tahu saya, cerita-cerita kemarin, maksud saya mudah-mudahan daftar kembali pemilu yang akan datang.

#### **F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):**

Janganlah jangan.

**KETUA RAPAT:**

Oh gitu.

**F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):**

Tetap di Gerindra.

**KETUA RAPAT:**

Pantas duduk berbarengan, dijaga di situ ya.

**F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):**

Ini udah diiket ini.

**KETUA RAPAT:**

Oh ya udah. Semoga ikat, semoga ikatannya mantap Pak. Silakan, Ibu Novita

**F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):**

Terima kasih, Pak Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang saya hormati Pak Menteri yang baik hati dan tidak sombong,  
Pak Menteri, Pak Sekjen, dan jajaran,  
Pak Novi Pak Dirjen semuanya, semuanya baik-baik,  
Kemudian yang saya hormati juga Pimpinan dan Anggota Komisi V,**

Langsung saja, Pak Menteri saya mengapresiasi walaupun pencapaiannya belum maksimal, tapi yakin nanti di bulan Desember pasti tercapai, karena kita lihat jago-jago semuanya, di semua Dirjen pasti *insya Allah* akan maksimal dalam penyerapan dan realisasi.

Kemudian, harapan saya *sih* pribadi Pak Menteri, kalau nanti di akhir ada sisa-sisa anggaran bisa disinergikan dengan kita, baik untuk padat karya atau kegiatan yang lainnya sesuai dengan usulan-usulan kita, karena kita berhubungan langsung di bawah.

Kemudian, PNBP juga kita berharap juga bisa maksimal, walaupun kemarin kita sudah terhambat dengan adanya Covid, tetapi karena ini sudah mulai melandai, pasti kreativitas harus dimaksimalkan, sehingga pendapatan PNBP bisa maksimal.

Kemudian, saya hanya kasih masukkan tentang darat Pak, ingin mengingatkan tentang ODOL, jangan sampai kontrolnya tidak maksimal,

karena ini bisa penting sekali untuk masyarakat jangan sampai ada kecelakaan-kecelakaan.

Kemudian, untuk pesawat tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman saya, jujur beberapa kali saya sampaikan ini penting sekali untuk udara Pak, pesawat kita kemarin, tadi yang disampaikan Pak Fauzi kan ada predikat yang kurang baik, semoga itu salah, tetapi yang kejadian-kejadian beberapa banyak sangat menyita perhatian *delay* yang tidak jelas, kemudian harga yang masih tinggi tiketnya dan bahkan saya juga pernah mengalami, karena tidak mendapatkan pesawat Garuda, sehingga saya pakai Citilink, sehingga di penerbangan di tengah jalan sudah 15 menit muter-muter, 20 menit akhirnya kembali, artinya pesawat ini harus betul-betul serius dilihat, dicek Pak.

Kemudian, kemarin juga ada Anggota Dewan sampai *delay* 2-3 jam di Halim, kemudian malah tidak jadi terbang gitu, itu Batik dan, Batik kalau *nggak* salah, saya langsung kirim kepada Pak Dirjen Udara dan itu tidak jelas gitu. Jadi, harap itu menjadi perhatian khusus pada Pak Menteri dan Pak Dirjen, apalagi Sekjen-nya mantan Dirjen Udara. Kalau di Cilacap Pak Menteri, terima kasih, sebetulnya harapan saya untuk bisa adanya penerbangan lagi itu sudah bagus sekali Pak Menteri, Pak Novi juga sudah ke sana, tetapi ada kendala memang subsidinya harus tinggi, jadi Pemdanya yang keberatan, sehingga saya walaupun belum bisa terlaksana, tapi sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri dan Pak Novi yang jauh-jauh sampai ke Cilacap, terima kasih, walaupun tetap bertahan nanti semoga subsidinya tidak berat, sehingga bisa melakukan penerbangan. Karena di Cilacap ini kabupaten industri yang paling besar di Jawa Tengah, ini ada Pertamina, ada PLTU, ada macam-macam bahkan pelabuhannya juga Tanjung Intan penting, tetapi penerbangannya masih mandek.

Kemudian tentang Kereta Api Pak Menteri, masih beberapa kejadian kecelakaan, harapan saya ya, yang palang pintu, kalau kereta apinya sendiri dan rel saya lihat *sih* sudah bagus pelayanannya juga sudah bagus, yang penting adalah tentang palang pintu. Jadi gimana ya, dari dulu saya udah dua periode memang pr-nya palang pintu, ini anggarannya *gimana* dikoordinasikan, sehingga bisa mengurangi kecelakaan, karena beberapa saat kemarin aja sudah ada beberapa kali menabrak dan banyak korban yang meninggal karena kecelakaan di palang pintu kereta api.

Kemudian yang terakhir mengenai mobil listrik, Pak Menteri saya ingin tanya, itu persiapannya bagaimana di Indonesia, kemudian sistemnya bagaimana, karena kalau di luar negeri kan sudah, sudah berjalan gitu, kalau di Indonesia itu bagaimana kebijakan dan sistem yang akan dilakukan di Indonesia.

Terakhir, kembali padat karya dan usulan-usulan dari Anggota Dewan mohon bisa dimaksimalkan Pak, karena kita yang berhadapan di bawah di lapangan, semoga hubungan kita semakin baik dengan sinergitas program-program yang ada.

Demikian, terima kasih Pak Menteri dan semuanya Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Pak Mulyadi, silakan, bersiap-siap Pak Sumail.

**F-P. GERINDRA (Drs. H. MULYADI, MMA.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Wakil Pimpinan serta seluruh Anggota yang saya hormati dan saya banggakan,  
Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen dan seluruh jajaran yang saya banggakan,  
Serta hadirin semua yang hadir, semoga senantiasa sehat dalam menjalankan aktivitas dan tugas masing-masing,**

Pertama saya harus menguatkan apa yang disampaikan Pimpinan pada saat prolog rapat di awal, terkait serapan anggaran itu harus menjadi indikator kinerja, tapi kami juga berharap serapan anggaran juga betul-betul memperhatikan, bahasa saya itu tepat, tepat waktu Pak, tepat fungsi, dan tepat sasaran gitu kan. Kenapa? Terkadang anggaran yang sangat terbatas alokasinya tidak prioritas dan seterusnya.

Yang kedua Pak Menteri, saya berharap Bapak tetap membantu Jawa Barat Pak, terutama terkait bencana Cianjur yang hari ini masih terus menjadi perhatian publik, Pak, kami berharap ada program-program cepat ya, terutama untuk di titik-titik bencana terkait penerangan jalan umum Pak, kemudian rambu-rambu yang rusak dan segala macam, karena saya komunikasi dengan Dinas Perhubungan Jawa Barat mereka kesulitan Pak, karena saya tahu itu anggaran mereka, bayangkan Jawa Barat yang begitu luas, dinas perhubungannya itu cuma dialokasikan anggaran 20 Miliar, Pak ya. Jadi, kalau misalnya ada sinergitas dari Kementerian yang Bapak Pimpin dengan Dinas Perhubungan di wilayah terutama di daerah bencana Pak Menteri, kami sangat apresiasi dan kalau boleh, bukan bahasa *ngemis* Pak, saya minta tolong lah Pak ya diperhatikan, Pak.

Kemudian Pak, saya menyoroti beberapa hal, terutama terkait tata kelola Perhubungan Darat, Pak.

Pertama, tolong Pak, kalau perlu kita hadir bareng-bareng Pak, untuk menyaksikan bagaimana truk-truk tambang di wilayah Rumpin dan Parung Panjang Pak, yang terus-menerus tidak pernah berhenti menelan korban Pak, belum lagi mobilitas masyarakat yang terganggu, belum lagi polusi yang tidak pernah berhenti, Pak. Jadi saya kira, mohon maaf sekali lagi saya selalu bilang negara harus hadir, jangan dibiarkan Pak, ya, kalau perlu ada *time table* dan *action plan* atau *desk* bersama untuk mengatasi kerumitan jalan tambang di wilayah Rumpin, Parung Panjang, dan yang berbatasan dengan Tangerang Pak.

Kemudian Pak, saya memperhatikan tol *elevated*, Pak, ternyata di atasnya sekarang sudah dimasuki oleh bus apa namanya bisnis transportasi yang berbasis *shuttle* Pak, ya, *hiace* itu segala macam Pak, kan sudah ada portal Pak, saya kira harusnya kecepatan *elevated* itu mohon maaf Pak, kita mungkin saya beresiko nih dengan para pengguna *shuttle* moda transportasi Jakarta Bandung, Pak, tapi kalau misalnya kendaraan umum juga masuk ke *elevated*, saya kira itu malah berpotensi memperpadat jalur yang di atas Pak, saya kira kalau misalnya *public transportation* ya sudahlah *enggak* apa-apa di bawah semua Pak gitu, kalau di atas ya maksimalkan saja untuk mobil-mobil pribadi Pak, supaya mobilitasnya lebih baik Pak.

Kemudian Pak, di wilayah pengembangan pemukiman Pak, di kawasan Jabodetabek ini saya mungkin *concern* ke BPTJ, Pak ya. Itu tolong diantisipasi Pak, kenapa, karena perkembangannya luar biasa, akhirnya menimbulkan titik-titik macet baru, dan saya juga tanyakan apa kabar KNKT terhadap kajian kecelakaan apa, bis tangki Pertamina yang mengorbankan belasan orang itu Pak, kita waktu saya datang ke lokasi, kita masih nunggu hasil kajian KNKT. *Nah*, kalau boleh Pak kami diberikan laporan Pak gitu, dan kalau koordinasi di level Jabodetabek tidak maksimal, itu dampaknya luar biasa Pak, karena kepadatan penduduk yang luar biasa Pak, seperti contoh misalnya saya analisa dalam bahasa awam, ternyata pembukaan *median* di depan satu properti besar itu, ternyata tanpa sepengetahuan BPTJ Pak ya, padahal itu mungkin harusnya dalam konteks AMDAL lalu lintas itu tidak boleh dibuka Pak. *Nah*, itu mungkin saya kira peningkatan koordinasi dengan wilayah juga harus diperkuat Pak Menteri.

Kemudian Pak, terkait kereta cepat Pak. Saya dapat tugas dari Pimpinan untuk melakukan kunjungan spesifik terhadap stasiun di Padalarang. Paparan dari kereta api, dari PT. KAI, dari kereta cepat, wah itu keren-keren, Pak. Tapi masalahnya, saya kira lintas koordinasi kementerian dan Lembaga tidak, kurang maksimal, kenapa? Kita mau mengakses stasiun kereta cepat tapi menuju stasiunnya *nggak* pernah cepat Pak, karena itu memasuki pasar Padalarang Pak, macet dan itu saya lihat tidak ada geliat pembangunan untuk membuka akses baru misalnya, terhadap stasiun kereta cepat itu, Pak. Jadi, saya kira itu juga perlu dikoordinasikan Pak, dengan badan pengatur transportasi daerah Pak, supaya ada usulanlah, supaya nanti aksesibilitas terhadap stasiun kereta cepat itu bisa semakin baik Pak.

Kemudian Pak, izin, saya mengapresiasi dan berterima kasih Pak, terkait beroperasinya Kertajati. *Nah*, ini yang ingin saya perdalam barangkali kalau teman-teman sudah mengapresiasi itu dan saya juga sangat bahagia Pak Kertajati berfungsi, saya minta mungkin Bapak membuat kajian Pak, terhadap indikasi benturan kepentingan atau perang kepentingan antara Husein Sastranegara dengan Kertajati ya, jangan sampai kemudian proses migrasi atau hijrahnya Husein misalnya, tidak semulus misalnya Polonia ke Kualanamu Pak, gitu, ya, kembalikan saja fungsi bandara militer itu, tapi walaupun misalnya harus ada konversi dalam tanda petik misalnya kepentingan angkatan udara, saya justru mengusulkan kalau Bapak berkenan, itu *traffic* menuju Jakarta Pak, dari pagi itu kalau dari arah Bogor itu luar biasa Pak, bahkan saya ke Pak

Menteri PUPR mengusulkan kalau perlu Jagorawi itu ada *elevated*, karena macetnya sudah tidak pernah selesai itu Pak, ya.

*Nah*, saya kira Kementerian Perhubungan barangkali untuk mengurangi potensi kemacetan itu, barangkali ada kajian Atang Sanjaya Bogor dikaji saja, Pak itu, untuk dijadikan juga kerja sama sebagai bandara komersial Pak, untuk membendung penumpang-penumpang yang datang dari arah Sukabumi, Cianjur, dan seterusnya Pak, terutama dari wilayah Bogor dan wilayah yang berbatasan dengan Tenjo Tangerang juga mungkin bisa mengakses menuju Atang Sanjaya saya kira Pak, ya.

Itu hal-hal yang menjadi perhatian Pak, sekali lagi kami mengapresiasi apapun yang sudah Bapak capai dan kita terus bersinergi supaya negeri ini menjadi terus lebih baik, Pimpinan terima kasih sehat selalu akhirul kalam.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Mul. Pak Soehartono silakan, bersiap-siap Pak Sahrul Yadi.

**F-P.NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):**

Terima kasih.

**Ketua, Wakil Ketua yang saya hormati,  
Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Pak Menteri PU, eh Menteri Perhubungan berikut jajarannya yang saya hormati,**

Saya ingin menyuarakan kembali dari Dapil saya, tentang pembangunan Stasiun Kereta Api Madiun, Tahun '19, sebelum Covid. Kami bersama Balai Kereta Api mengadakan rapat koordinasi bersama Walikota untuk membicarakan pembangunan tentang stasiun kereta api. Saya melihat itu sangat mungkin karena stasiun kecil di kanan kirinya itu sudah terbangun semua, tinggal di Madiun yang belum terbangun, belum terbangunnya itu kemungkinan karena lahannya sempit.

Oleh karena itu, saya selaku Anggota DPR koordinasi dengan Walikota, meminta jalan di sebelahnya yang lebarnya kurang lebih 16 meter, jadi Jalan Stasiun dan Jalan Biliton, dalam rapat itu oke, Walikota juga oke, untuk apa memindahkan jalan di sebelahnya, kebetulan di sebelahnya itu asetnya kereta api.

Jadi, saya *face to face* dengan walikota itu gampang diatur penjelasannya Walikota tentang aset, aset itu semua akan milik negara, *ngapain* harus sulit, *nah* ini yang terjadi di Madiun gitu ya. Tapi, karena Covid akhirnya proyek itu tidak berlanjut, tetapi hibah jalan Pemkot Madiun ke stasiun yang jalan stasiun masih utuh, jadi tidak ada perubahan dan sebagainya, yang



sebagian Jalan Biliton itu udah dirusak dan dipindahkan ke sebelahnya atau dengan kata lain jalan baru, ya.

Sebenarnya Kotamadya dalam hal ini tidak bersikukuh demi keindahan pembangunan Stasiun, karena Stasiun Madiun ini dengan dapat hibah tanah selebar 16 meter kali sepanjang jalan, itu sudah luar biasa dan tentu apa secara arsitektur pembangunan stasiun itu menjadi leluasa gitu ya, belum lahan parkir di sebelahnya. Oleh karena itu, karena Covid sekarang ini sudah tidak ada ya atau berkurang banyak, tolong program pembangunan Stasiun Kota Madiun itu ditinjau kembali atau apalah namanya gitu ya, karena itu sudah terlanjur Pak, udah terlanjur hibah, ya, walaupun secara administrasi belum dilakukan, tetapi saya jamin hal semacam ini, Pemda, itu sangat membantu agar Stasiun Madiun itu representatif, dengan lebar dan sebagainya, apa tempat parkir dan sebagainya dan itu juga tersambung dengan program Kotamadya yang membuat program kayak Malioboro, itu langsung masuk, Pak. Jadi, Jalan Pahlawan yang di Madiun itu atau representasi dari Malioboro itu langsung berhubungan dengan halaman stasiun yang kelak akan dibangun. Itu aja Pak dari saya, mohon untuk diperhatikan, makasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Makasih Pak Soehartono. Pak Syahrul Aidi, nanti Pak, dilanjutkan oleh Pak Sumail, silakan Pak Syahrul.

#### **F-PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):**

Terima kasih, Ketua.

Tadi beberapa catatan sudah disampaikan oleh Anggota, mungkin tidak saya ulangi lagi, hanya dari program yang ada di Tahun 2022, dan mungkin juga ada dua tahun sebelumnya yang sempat menjadi diskusi kita waktu pembahasan RAPBN kemarin yaitu Program BTS, Pak. Kami ingin mendapatkan evaluasi dan laporan tentang program *by the service* ini yang didapatkan oleh 10 kota kalau tidak salah kemarin, yang sebelumnya itu ada 5 kota. *Nah*, targetnya itu dalam bentuk kinerjanya tercapai tidak, dengan mengurangi kemacetan dan juga pelayanan bagi transportasi umum bagi masyarakat untuk 10 kota yang ada di Indonesia, dan memang menjadi perbincangan kemarin karena ada beberapa kota yang kita usulkan belum bisa masuk. *Nah*, barangkali bentuknya supaya untuk keadilan ke depannya seperti apa.

Kemudian, kemarin saya ditelepon oleh Bupati Indragiri Hilir Pak, di sana ada Bandara Tempuling. *Nah*, dulu diamanahkan kepada daerah untuk menyelesaikan asetnya dan beliau menyampaikan ke Pak Menteri langsung, kapan Pak Menteri bisa menerima Bupati Indragiri Hilir ini untuk menyerahkan aset tersebut ke Pemerintah Pusat, mudah-mudahan ada waktu dan saya diminta untuk mendampingi, agar bisa dikelola. Ini potensial untuk daerah Riau, sesungguhnya yang paling jauh jaraknya sekarang ini, dalam kondisi sekarang itu dan memungkinkan untuk dimanfaatkan bandara ini dari tiga atau empat bandara yang dibangun oleh daerah adalah Bandara Tempuling, karena

jaraknya dari Pekanbaru cukup jauh, Pak, lebih kurang 9 jam naik darat dan jalannya cukup parah, ya.

Kemudian, yang ketiga adalah tentang program yang terkomunikasikan dengan kami untuk 2023 Pak, ada Dermaga Sungai yang menjadi aspirasi masyarakat, hanya saja ini di DED-nya ini dibuat oleh daerah hanya, tetapi DED tersebut tidak sesuai dengan mungkin standar. Mudah-mudahan Pak, tetap kita bangun dan ada peluang untuk memperbaiki atau merevisi DED. Itu saja Ketua, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Syahrul. Silakan, Pak Sumail.

**F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):**

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Siap-siap Pak Irwan.

**F-P.GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat siang serta salam sejahtera,

**Pimpinan dan segenap Anggota, Pak Menteri, Pak Sekjen, dan seluruh jajaran yang saya hormati,**

Tadi, sebenarnya sudah banyak yang disampaikan atau catatan-catatan daripada Bapak dan Ibu para Anggota. Tentu saya juga mengapresiasi terhadap capaian kinerja dan serapan anggaran, ini cukup membanggakan bagi kami, ya, tahun-tahun ke depan tentu bisa ditingkatkan, minimal dipertahankan, Pak Menteri.

Catatan lain, kaitan dengan beberapa bandara-bandara yang telah dibangun Pak Menteri, iya kan, saya minggu lalu pulang ke dusun di Sumatera Selatan tepatnya di Kabupaten Musi Banyuasin, ada bandara di sana sudah hampir berapa, hampir 10 tahunan lebih barangkali dibangun namun belum beroperasi hingga saat ini. *Nah*, ini tentu ini kan mubazir Pak.

Tujuan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dengan dibangunnya bandara itu agar koneksitas antar daerah itu tersambung dengan baik dan mempercepat pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi. Juga, ada bandara-bandara Perintis yang bulan 4 tempo hari kalau tidak salah di Madura juga diresmikan oleh Pak Menteri bersama Presiden, akan tetapi rutanya atau jadwal-jadwal penerbangannya hampir tidak ada, yang saya dengar, hanya

dilandasi oleh pesawat-pesawat yang seolah-olah bahwa itu menjadi bandara *private* kayak begitu, Jember juga demikian, Banyuwangi yang tadinya, Banyuwangi Dapil saya, Pak, tiap hari itu 4-5 *flight*, hari ini cuman 1 *flight* saja Pak. *Nah*, belum lagi kita hadapi bahwa harga tiketnya yang melonjak, temen tadi juga bercerita, saya kira juga saya apa namanya akan menyampaikan biasanya saya ke Banyuwangi, saya selalu naik kelas ekonomi Pak Ketua, karena kalau naik kelas bisnis nanti saya ditegur sama Pak Ketua, katanya tidak merakyat gitu kan, 800 hingga 900.000, tapi hari ini sudah hampir 2 juta Pak, itu kelas ekonominya.

*Nah*, ini agak sedikit apa namanya di tengah masyarakat yang baru mulai pulih dari Covid, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat akan tetapi diterpa dengan harga tiket yang sedemikian tinggi, maka lagi-lagi bahwa harapan kita dalam rangka untuk percepatan pemulihan ekonomi ini tidak segera terealisasi.

*Nah*, bagi Kementerian, harapan saya bahwa tolong dicarikan jalan keluar Pak, ini kan, tolong dicarikan jalan keluar agar bandara-bandara yang kita sudah bangun itu fungsinya optimal, Banyuwangi-Surabaya juga sudah tidak ada, padahal statusnya bandara itu Bandara Internasional, ada harapan dari pemerintah daerah setempat agar Bandara Banyuwangi Blimbingsari itu dijadikan untuk embarkasi Umroh, sehingga bisa mencakup areal di daerah tapal kuda dan sekitarnya, daerah Jawa Timur ke timur dan Bali bagian Barat itu bisa masuk di sana, Pak Menteri.

Terus yang ketiga, ada beberapa terminal-terminal Pak, bus antar kota antar provinsi juga sudah tidak terawat dengan baik, kalau di Palembang ada Terminal Karya Jaya, terus kemudian di Betung Pak Menteri, saya kemarin lewat sana juga via darat, dari Palembang menuju ke Muba, itu di Betung, ya bis juga sudah tidak masuk sana lagi Pak, walaupun misalnya harus diserahkan atau mungkin itu sudah tanggung jawab daerah, saya masih belum paham statusnya, agar *maintenance-maintenance* dan perawatan-perawatan itu, sehingga betul-betul terminal itu berfungsi untuk di mana tempat orang apa namanya mencari, mencari alat transportasi umum menuju ke daerah-daerah sasaran.

Saya juga sependapat dengan kawan-kawan tadi yang menyoal tentang ada *rating* salah satu maskapai kita Pak, yang *grade*-nya atau nilainya itu cukup, apa namanya, bikin kita sedihlah seperti itu, barangkali nanti Pimpinan perlu dipanggil maskapai itu, sehingga kemudian tidak ada tampilan ke dunia internasional, bahwa begitu orang-orang mau masuk ke Indonesia ini merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, dan keselamatannya terancam apabila menggunakan maskapai tersebut.

Demikian, saya kira Pimpinan dan Pak Menteri.  
*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

*Wa'alaikumsalam* Pak Sumail, terima kasih. Pak Irwan silakan Pak Irwan.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):**

Ya, terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan Komisi V yang saya hormati, serta rekan-rekan Komisi V yang saya banggakan,  
Bapak Menteri Perhubungan, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Direktur, serta seluruh keluarga besar Kementerian Perhubungan yang hadir pada rapat ini yang saya banggakan,**

Pertama-tama terkait mengenai PNBP tentu kami sangat mengapresiasi dan kami sangat meyakini bahwa sebenarnya Kementerian Perhubungan melalui kerja keras dan beberapa terobosan bisa lebih dari pencapaian yang sudah luar biasa hari ini, 90% realisasinya dari target 8,6 Triliun. Mungkin saran kami bahwa terkait sektor perhubungan laut untuk jasa kapal barang, terutama jasa kapal barang ini yang kemudian segera dioptimalisasi pendelegasian perusahaan pelabuhan ke swasta. Karena kalau ini *clear*, selesai, kami yakin, meyakini bahwa memang sektor laut kita bisa kemudian menyumbang PNBP yang bisa lebih signifikan lagi dari yang dicapai hari ini, tentu hari ini juga kami sangat-sangat mengapresiasi.

Kemudian, terkait komitmen Kementerian Perhubungan untuk tetap merealisasikan bebas ODOL di 2023, kami juga sangat mengapresiasi, kemarin waktu kunjungan di Amerika, saya bertanya secara spesifik kepada Direktur untuk di *Department of Transportation* di Amerika, bahkan Amerika *nggak* punya sistem untuk menyelesaikan masalah ODOL ini, pemerintah pusatnya, kami juga *nggak* punya, bahkan kami juga sampai sekarang tidak bisa menyelesaikan masalah ini. *Nah*, maksud saya bagaimana Kementerian Perhubungan memastikannya kalau di 2023 Kementerian Perhubungan juga masih kemudian optimis untuk realisasi bebas ODOL ini, sementara ada beberapa *cons* ya, ada beberapa kontra dari berbagai pihak yang kemudian bisa saja menolak terkait bebas ODOL ini. *Nah*, kita mau lihat gimana sih, bagaimana Kementerian Perhubungan bisa memastikan hal ini.

Kemudian, yang terakhir Pimpinan. Kemarin saya turun ke Kaltim, lagi-lagi saya juga mengapresiasi ya, Kementerian Perhubungan melalui program Syahrani, Syahbandar Melayani di, bukan Syahrini ya, Syahrani, Syahbandar Melayani, *nah*, terobosan di KSOP Balikpapan itu, membangun stasiun *life jacket* untuk nelayan di Muara Manggar. Kelihatannya sederhana, tetapi ini menyangkut keselamatan manusia, satu nyawa rakyat Indonesia terselamatkan itu hal yang sangat luar biasa. *Nah*, cuma saya melihat ini masih dari CSR, mengapa ini kemudian program yang stasiun *life jacket* ini kemudian diadopsi, kemudian menjadi program Kementerian Perhubungan tahun-tahun ke depan, karena sebenarnya ini juga *nggak* butuh biaya besar, satu stasiun itu saya tanya 70 juta itu CSR dari Mitra KSOP di Balikpapan, tetapi ini sangat mampu melindungi dan memberi keselamatan kepada nelayan-nelayan kita yang berjuang di tengah laut ya.

Kemudian, program ini juga *station life jacket* ini juga bisa kemudian diintegrasikan dengan sektor-sektor lain, *stakeholder* yang lain, dengan Basarnas, dengan Pol air, dengan Lanal untuk kemudian memantau keselamatan para nelayan ini. Jadi, saya sangat mengapresiasi dan ini bisa dicontoh, harapan saya seluruh Syahbandar KSOP KUPP bisa membangunnya lewat CSR ataupun lewat APBN, stasiun-stasiun *life jacket* seperti ini.

*Nah*, tambahan, masih di lokasi terkait Muara Manggar ini, Pak Menteri saya sangat minta ini diperhatikan, sejak awal tahun saya sudah mengatakan bahwa di Muara Manggar ini telah terjadi korban jiwa, nelayan meninggal, ada yang kemudian kapalnya terbalik, ya, korbannya *tuh* udah sangat banyak karena muaranya itu ada pendangkalan, tetapi tidak ada rambu suar ya, dan ini sudah saya turun ke lapangan juga dengan KSOP dan lain-lainnya, tetapi saya tanyakan di kantor navigasi di Samarinda itu baru DED tahun depan, masa untuk korban yang udah bertahun-tahun permasalahan untuk DED butuh satu tahun, 2024 baru pelaksanaan. Padahal saya tanya hanya untuk membangun menara suar di darat 12 meter, kemudian rambu suar di laut dua menara setinggi 7 meter, itu nilainya juga hanya 4,5 Miliar, jangan sampai menunggu lagi 2023 ini ada yang korban baru kita bangun 2024. Saya mohon, ini menjadi atensi khusus, dibangunlah Pak, tahun depan, ya, ini *nggak-nggak* mengganggu yang lain, walaupun memang tidak ada lagi, *nggak* apa-apa Pak, apa yang lain-lain kita bisa diskusikan untuk kemudian diprioritaskan ke sini.

Demikian, terima kasih banyak atas atensi dari Kementerian Perhubungan, Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan seluruh keluarga besar Kementerian Perhubungan, lebih kurangnya saya mohon maaf.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih, Pak Irwan.

Ada satu sebenarnya yang Pak Willem Wandik ini di virtual, tapi untuk penghargaan Pak Dewo, Pak Dewo duluan barangkali silakan, baru virtual ya, Pak Dewo mau ada tambahan katanya, atau virtual dulu? Virtual dulu, silakan Pak, Pak Willem Wandik, silakan Pak Willem, silakan Pak, Pak Willem silakan.

**F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Baik.

**Pak Ketua dan juga Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa.**

Pada kesempatan Agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN 2022 dan Penyerahan Hasil Kompilasi Kunjungan Kerja pada 2022-2023 ini, kami ingin menyampaikan berapa catatan.

Pertama, tentu kami memberikan apresiasi kepada mitra atas kerja-kerja sama yang baik, sehingga bisa mencapai penyerapan anggaran di Kementerian Perhubungan 2022 ini mencapai 75% atau terserap 25 Triliun dari total Pagu 33 Triliun dengan kondisi yang ada, dan masih memungkinkan target Realisasi 97% sampai akhir Desember mendatang nanti dapat tercapai, khususnya di belanja modal yang baru terserap 71%, dan terkait realisasi dari sumber dana dari pinjaman dan hibah luar negeri, baru terserap 37% dan sumber dana SBSN baru terserap 67%. Sebaiknya diperhatikan lagi realisasi ini agar pada akhir tahun dapat terealisasi hingga 100%, khususnya PHLN-nya, dan kami apresiasi, Realisasi PNBPN yang sampai November '22 sudah mencapai 90% atau 7,8 Triliun, semoga dapat terealisasi di atas 100% kalau memungkinkan di atas capaian PNBPN Tahun 2021.

Dan, terkait Program Padat Karya, lebih baik lagi pelaksanaannya pada Tahun 2023 mendatang. Dan terkait dengan pengoperasian Bandara Kertajati untuk pengoperasian ibadah Umroh, sudah berapa jumlah jamaah Umroh yang diangkut melalui Bandara Kertajati ini, progres, ya, pengoperasian ini hanya untuk kegiatan ibadah Umroh saja atau direncanakan untuk ibadah Haji 2023 mendatang nanti. Dan, terkait dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung, mungkin perlu juga disampaikan sudah sejauh mana perkembangan pembangunan infrastrukturnya, apakah masih kekurangan dananya sampai program pengoperasian 100% pada Tahun 2023 nanti, jangan sampai terjadi perdebatan panas kembali proyek KCJB ini pada Tahun 2023.

**KETUA RAPAT:**

Bisa dipersingkat, Pak William? Karena belum makan siang ini kita.

**F-P DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Kepentingan Dapil Papua itu.

**KETUA RAPAT:**

Cukup, Pak William?

**F-DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

*Nggak* sedikit ini terkait dengan Dapil. Pak Menteri dan juga para Dirjen, perlu mendorong beberapa lapangan terbang di Papua, ditingkatkan statusnya menjadi, menjadi bandara penunjang penghubung utama melalui subsidi pemerintah, yaitu Bandara Senggeh di Kabupaten Keerom dan juga Bandara Karubaga di Kabupaten Tolikara, dan juga Bandara Mulia di Kabupaten Puncak Jaya, ini perlu ditingkatkan menjadi bandara penyangga untuk wilayah Papua, baik di pegunungan tengah maupun di pesisir, dan juga kepulauan, dan juga tambah volume penerbangan jembatan udara Timika-Wamena perlu ditambahkan, dan juga Jayapura-Wamena dan Jayapura-Karubaga. Ini seiring dengan peningkatan jumlah penumpang, perlu dilakukan penambahan jumlah penerbangan dari Timika-Wamena, Jayapura-Wamena, dan juga Jayapura-

Karubaga, dan juga untuk pelabuhan dan bandara komersial yang ada di Papua juga perlu diperhatikan.

Dan, yang berikut itu selama ini kapal-kapal yang rusak di seluruh pelabuhan dan dermaga di Papua selama ini, dibawa keluar, dibawa ke Jawa, dibawa ke Makassar, kadang juga membutuhkan waktu dan biaya yang begitu besar, sehingga diharapkan supaya di Jayapura itu perlu ada pembangunan rel dan apa, *dock* untuk kalau ada, ada kerusakan kapal bisa diperbaiki di Jayapura, tidak harus dibawa ke luar seperti yang selama ini terjadi.

Dan berikut, dan yang berikut adalah untuk kegiatan program Padat Karya di Papua, diharapkan juga terjadi tidak hanya terjadi di pelabuhan seperti kemarin, tapi diharapkannya terjadi di bandara-bandara di Jayapura seperti hal ini di Bandara Sentani, dan juga merupakan Bandara Utama Papua, ini seperti (suara kurang jelas/rekaman terputus) di tengah-tengah bandara yang begitu ramai, tapi kiri kanannya ditumbuhi rumput, sebentar lagi tumbuh menjadi hutan. Jadi, kalau bisa program padat karyanya difungsikan tidak hanya di Bandara Sentani Jayapura, tapi juga pada bandara-bandara lain di Timika, di Wamena dan lain-lain.

Pada kesempatan ini, itu saya bisa dapat kami sampaikan dan kalau memang tinggal sementara kami akan tambahkan lagi, sekian terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Ya, semoga tidak ditambahkan lagi kali ini, Pak, kita tunggu di rapat berikut, kita kangen Pak William ini. Mas Dewo, ya, Mas Dewo silakan singkat sebelum ke meja Pimpinan.

#### **F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Singkat saja, Pimpinan.

Sebenarnya apa yang ingin saya tambahkan *tuh* bukan sesuatu yang baru, hampir semua kawan-kawan sudah menyampaikan ini kepada Pak Menteri Perhubungan, tapi saya sengaja menambahkan karena *insya Allah* menjadi diskresi kami dan mudah-mudahan menjadi diskresinya dari Kementerian Perhubungan juga. Tapi, sebelum saya menambahkan saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bu Novi, semoga panjang umur, Bu Novi sedang menyiapkan makan siang di ruang makan, *monggo* nanti Pak Menteri dengan seluruh jajarannya berkenan untuk bergabung makan siang yang disiapkan oleh Bu Novi, spesial.

Jadi, saya ingin menyampaikan wacana atau gagasan yang dilontarkan oleh kawan saya, Pak Mulyadi, itu bahwa Bandara Kertajati menjadi, menjadi bandara yang dipakai untuk melayani Umroh dan jamaah Haji. Ini sesuatu yang sangat bagus Pak Menteri, mengingat kita semua prihatin dengan bandara tersebut, tetapi bagaimana mencari sebuah solusi supaya menjadi bandara komersial, bandara umum yang punya eksistensi tinggi itu tampaknya masih belum tergambarkan, belum ada satu titik terang, maka dengan munculnya

wacana ini sebagai bandara yang melayani khusus untuk Umroh dan Haji bisa dipikirkan cara masak-masak oleh Pak Menteri Perhubungan.

Kemarin saya di Bandara Solo sebenarnya ada aspirasi dari pengusaha travel atau bandara di sana, supaya pemberangkatan Umroh itu tidak perlu sampai ke Soekarno Hatta, tapi dari Bandara Solo langsung ke Jeddah atau ke tanah suci. Begitu juga ketika kami kunjungan spesifik di Palembang ada aspirasi yang sama, dan di tempat-tempat yang lain tampaknya seperti itu, tetapi ini mungkin menjadi sebuah kajian bilamana diberangkatkan dari masing-masing daerahnya juga *cost* yang tinggi terhadap maskapai tersebut, atau seperti apa, mengapa harus dirubah ke pusat yaitu ke Bandara Soekarno Hatta. Kalau memang kebijakannya tidak dari masing-masing daerah seperti yang sekarang ini berjalan, dipusatkan di Bandara Soekarno-Hatta, saya sangat mendukung, lebih baik itu dipusatkan di Bandara Kertajati.

Jadi, dalam hal ini saya meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan satu studi Pak, kelayakan dan kelaikan terhadap konteks ini Bandara Kertajati untuk melayani Umroh dan Haji, itu sangat bagus, kalau setiap daerah mau ke Jeddah atau ke Madinah itu pemberangkatannya dan begitu kedatangannya itu dari Kertajati. Bagaimana Menteri Perhubungan mengkaji dari sisi sarana prasarana, bagaimana mengkaji dari sisi keekonomiannya, dari pihak maskapai, dari pihak bandara, kemudian dari pihak komunitas *travel*, organisasi *travel* dan Haji tersebut, ya itu semua didengarkan. Kemudian juga bagaimana mengkoordinasikan dengan Kementerian Agama, dengan pihak-pihak yang lain, dengan seluruh *stakeholder*, semuanya itu dilakukan koordinasi, kemudian keluar sebuah rekomendasi, ditetapkan saja, bahwa Kertajati fokus untuk itu. Jadi, yang semula tidak direncanakan untuk itu, merupakan keprihatinan bersama, tetapi wacana tersebut bilamana itu terealisasi, bagus, akan menjadi sebuah keberkahan.

Jadi ini memang, Pimpinan mohon maaf, ini memang sengaja saya tambahkan supaya ini betul-betul menjadi diskresi dari Menteri Perhubungan, saya kira itu terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Sudah sangat jelas. Ini pembicara yang keempat ini soal Kertajati. Terima kasih, Mas Dewo. Dari meja Pimpinan saya persilakan, silakan.

#### **F-PPP (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Terima kasih, Pak Ketua dan Pimpinan Komisi V.

**Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Anggota Komisi V,  
Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, seluruh jajaran  
dari Kementerian Perhubungan,**



Ada beberapa hal Pak, yang ingin disampaikan, ada tiga hal tapi, tidak panjang *ini*, Pak Menteri.

Yang pertama sama seperti rekan-rekan terdahulu, saya mengucapkan apresiasi atas anggaran yang sudah mencapai 75%, tetapi tentu masih ada sisa sekitar 24,37%, kita harapkan dalam waktu sisa yang tidak banyak lagi, itu bisa terealisasikan.

Yang kedua mengenai realisasi PNPB, tadi teman-teman banyak menanyakan tentang apresiasi terhadap Dirjen Hubungan Laut, Perhubungan Laut, yang di mana PNPB-nya itu tinggi, tetapi yang ingin saya tanyakan adalah tentang PNPB yang rendah ini Pak, Dirjen Kereta Api, kira-kira kendalanya di mana itu, Pak. Jadi, kita harapkan ada strategi untuk mendongkrak PNPB tadi, itu yang pertama.

Yang kedua, mengenai strategi bagaimana bandara-bandara tadi yang disampaikan teman-teman, saya ingin menanyakan kepada Pak Menteri, bagaimana strateginya, agar bandara-bandara sudah dibangun itu bisa difungsikan kembali, karena sayang sekali Pak, anggaran yang dipergunakan untuk membangun anggaran itu cukup besar.

Yang ketiga Pak, ini Dapil *nih* Pak. Saya Dapil saya Sumatera Barat *nih* Pak Menteri, saya ingin menanyakan tentang sistem *traffic light*. *Nah*, saya kebetulan beberapa hari yang lalu saya ke Dapil, saya bertemu dengan wali, Pjs. Walikota Payakumbuh beserta Kepala Dinas Perhubungan, beliau memberikan informasi ke saya bahwasannya ada satu sistem baru dari Kementerian Perhubungan yaitu disebut ATCS ya, Pak, ya, *Area Traffic Control System*. *Nah*, jadi di situ Pjs. Walikotanya mengatakan ada beberapa kota di Dapil saya ini Pak, yang sudah dapat, antara lain kota Bukittinggi, kemudian ada Padang Panjang, *nah*, kalau kita lihat alurnya Pak, Padang Panjang, Bukittinggi, dan Payakumbuh, itu sebenarnya alur-alur transportasi di mana banyak wisatawan, di akhir-akhir pekan memang situ terlibat kemacetan. *Nah*, ini ada permintaan dari Pjs. Walikota Payakumbuh, sekiranya ada atensi dari Kementerian Perhubungan untuk membuat sistem ATCS tadi, di Kota Payakumbuh, karena di sana informasinya belum ada. Saya kira itu saja Pak Menteri yang bisa saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa direalisasikan.

*Wabillahi taufiq wal hidayah.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak. Pak Ridwan

#### **F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Iya makasih, Pak Ketua.

Pak Menteri, saya, mungkin yang saya mau sampaikan adalah persoalan banyaknya bandara-bandara yang tidak, apa namanya, penerbangannya tidak ada sama sekali, ini Pak Menteri mesti ada pemikiran baru ini, sebab kalau tidak, keluhan-keluhan masyarakat di Indonesia dan persoalan pemakai penerbangan ini akan menjadi terus menerus, contoh juga misalnya di salah satu daerah tujuan wisata di Sulawesi Tenggara itu Pak, di Wakatobi, itu juga belum ada penerbangan, tapi *alhamdulillah* kalau saya tidak salah saya baru-baru komunikasi dengan Kepala Bandara yang ada di sana, itu tanggal 5 Desember atau 10 Desember sudah ada Wings yang akan ke sana. Artinya ini mesti kita antisipasi tidak boleh terjadi berikutnya Pak, dan ini pikiran ini harus menjadi pikiran baru Pak Menteri, karena kalau ini semua terjadi di seluruh Indonesia dan terus-menerus tidak ada penanganan yang lebih apa namanya, yang lebih apa, serius, dan tidak teratasi dengan baik, ini bisa berdampak negatif dalam personal penerbangan kita. Tadi ada ide Pak Ketua yang perlu juga barangkali Pak Menteri cermati mungkin perlu ada satu skema baru, mungkin dari BUMN-BUMN kita itu, bisa berperan untuk melakukan, apa namanya, usaha-usaha penerbangan yang pada akhirnya bisa memberi kontribusi penerbangan kita jauh lebih baik.

Kemudian yang kedua Pak Menteri, ini di Sulawesi Tenggara itu ada penyeberangan *anu* namanya, penyeberangan Mawasangka-Talaga Pak, untuk *ferry* ini, *ferry*, untuk perhubungan darat, Dirjen Perhubungan Darat, itu kita minta kalau ada di situ adalah tentang penetapan lintas penyeberangan Perintis untuk Tahun 2023 ini, Pak, karena antara dua pulau itu sudah begitu banyak apa komunikasi, banyak komoditas yang terjadi di situ, banyak penumpang yang bisa dipakai pada situ. *Nah*, kalau bisa ada apa namanya penetapan lintas penerbangan Perintis untuk Tahun 2023, kita bermohon Pak Menteri bisa melalui Dirjen ya, untuk menyampaikan hal itu Pak. Dua hal ini saja Pak, terima kasih Pak.

#### **KETUA RAPAT:**

Makasih, Pak Ridwan, Pak Roberth silakan.

#### **F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Baik terima kasih.

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Saudara Menteri dan Sekjen beserta seluruh jajaran yang saya hormati  
dan saya banggakan, hadirin yang ikut hadir, saya hormati dan saya  
banggakan,**

Saya akan coba beberapa catatan saya tentang Evaluasi Anggaran 2022, dan nanti ada keluhan masyarakat yang ingin saya sampaikan.

Yang pertama, ini *pointer* pertanyaan dan rekomendasi dari saya, hampir mungkin akan ada beberapa yang mungkin sama dengan teman-teman. Yang pertama, tolong ke depannya Kementerian Perhubungan saya mohon untuk buat materi yang lebih detail, ya, dari saat ini, saya kira kita lihat

materinya terlalu singkat, ya, karena kita akan mengevaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan Kementerian Perhubungan di Tahun 2022 ini, dengan total Pagu Anggaran sebesar 33,51 Triliun.

Jadi, saya mohon lain kali tolong buat capaian realisasi kegiatan per Ditjen, dan per kegiatan, bahkan mungkin perlu per wilayah, ya. Karena yang ada dalam presentasi Kementerian Perhubungan saat ini ya, kami lihat beberapa yang belum jelas lokasinya dan jumlah kegiatan jauh lebih sedikit dari yang tampak dalam RKA K/L Tahun 2022. Saya khawatir presentasi yang Pak, Saudara Menteri sampaikan, bisa menyebabkan *blunder* ya, yang sebenarnya sudah banyak yang dicapai ya, atau dilakukan, tapi tidak tampak dalam presentasi yang Bapak sampaikan.

Yang kedua, Realisasi Anggaran Kementerian Perhubungan per November 2022 adalah sebesar 75,63% atau rupiahnya sebesar 25,35 Triliun, realisasi belanja modal sudah cukup di atas 70% ya, tetapi ini merupakan jenis belanja yang realisasinya paling rendah yaitu 71,8%. Saya mohon jelaskan belanja modal untuk kegiatan yang mana saja, ini perlu dijelaskan, karena ketika kita bicara tentang belanja modal, maka kita akan berbicara tentang aset yang asumsinya bisa memberikan penambahan nilai PNBPN kita.

Yang ketiga, selain itu dengan merinci realisasi anggaran utamanya belanja modal untuk kegiatan yang mana saja, maka kita bisa melihat apakah hal ini terjadi karena efisien, efisiensi, atau *force majeure* dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan yang terhambat. Misalnya saja proses lelang ya, proses serah terima aset dan sebagainya.

Yang keempat, ada realisasi kegiatan program yang dibiayai menggunakan SBSN ya, atau Surat Belanja Syariah Nasional atau Obligasi Syariah, mengapa realisasi baru tercapai 67%, mohon penjelasan, koma 21%. Saya ingatkan saja, sayang sekali jika kegiatan program yang dibiayai dengan utang negara tidak bisa dimanfaatkan optimal untuk pembiayaan kegiatan, negara akan mengalami dua kerugian sekaligus, kita harus membayar bunga dari hutang tidak terpakai, pada posisi lain kegiatan program tidak akan berdampak pada pelayanan publik. Jadi, tolong sampaikan kepada kami berapa Prognosis SBN hingga akhir Tahun 2022 ini.

Dan yang terakhir, saya ingin tahu berapa potensi SAL, ya, Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022 ini, ya, saya ingin mengingatkan juga ya, jika SAL ini dimaksimalkan, maka pembiayaan program Kementerian dari pinjaman luar negeri dapat dikurangi, karena menurut PMK Nomor 5 Tahun 2021, Pasal 8 ayat (1), SAL dapat digunakan untuk, yang pertama, pemenuhan kebutuhan kas kontemporer. Dua, pemenuhan pembiayaan anggaran dan/atau stabilisasi. Jika akumulasi SAL Kementerian Perhubungan utamanya yang bersumber murni cukup besar, maka logika sederhananya hal ini dapat digunakan untuk Tahun Anggaran ke depannya.

Ini catatan untuk anggaran, pembahasan anggaran. Yang berikut ini keluhan masyarakat yang kami dapat, yang kami ingin minta waktu Pimpinan untuk menyampaikan ini.

Yang pertama, ini dari Dapil Papua, kebetulan Papua Barat yaitu tentang keluhan adanya konspirasi monopoli di dalam pelayanan, jasa pelayaran penumpang Sorong-Waisai ya, yang ada indikasi dilakukan oleh Kepala KSOP Sorong ya.

Pak Menteri dan jajaran, ini memang apa yang dilakukan katanya sudah sesuai prosedur ya kan, tetapi saya ingin sampaikan bahwa memang sesuai prosedur, tetapi hasilnya itu tidak, atau menciderai, atau menyusahkan masyarakat pemakai jasa, Pak Menteri, ya, karena di dalam yang katanya sudah ada rapat bersama ya kan, itu yang tadinya salah satu operator atau perusahaan pelayaran itu, ya, menyampaikan tentang besaran ya, besaran tiketnya dari Sorong ke Raja Ampat, lebih rendah dari apa yang diputuskan, padahal di kesanggupan perusahaan itu sudah sampaikan, dia jual tiket dengan harganya misalnya 100 ribu, tetapi ini dibatalkan, dinaikin menjadi 125.000. Berarti keputusannya kan tidak memberatkan rakyat, padahal perusahaan sudah sanggup melakukan itu, memberikan pelayanan untuk tidak memberatkan masyarakat gitu, ya kan.

Setelah diadakan rapat bersama, ya pasti ditekan sama, itu yang dibilang, ada indikasi penekanan begitu, dan bukan cuma itu saja, jadwal keberangkatan pun diatur bahwa tidak *fair*, bahwa yang satu dapatnya malam hari, yang satu ini boleh cuman siang saja, harusnya di ada keadilan di dalam penjadwalan itu, dan kalau dibilang bahwa rapat itu sudah sesuai prosedur, saya ingin sampaikan bahwa, menurut saya belum sesuai prosedur, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayanan, khususnya pada Pasal 22 ayat (2), yang inti isinya menyebutkan bahwa, untuk menyetujui tarif, harus melibatkan pengguna jasa. *Nah*, ini penggunanya tidak ikut pada waktu itu katanya.

Ya, jadi saya mohon ini, mohon terutama Pak Sekjen untuk bisa kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk bisa, karena masalah bukan baru satu ini di trayek, karena ini trayek wisata juga, ini banyak keluhan dari daerah ini, bukan baru sekali, saya sudah berapa kali kirim keluhan-keluhan masyarakat ini kepada Saudara Dirjen Kelautan, apa Perhubungan Laut, cuma Pak Menteri Pak Dirjen ini waktu menjadi Plt, dia gampang kita hubungi Pak, setelah Bapak jadi tetap, susah Pak, agak susah. Jadi, ini menjadi catatan Pak, untuk Pak Menteri, supaya komunikasi kita harus lancar.

Yang berikut, ini kemarin teman-teman saya dari Papua, khususnya dari daerah yang sekarang sudah mekar, Papua Tengah, itu dari Paniai, soal angkutan Damri, bus di sana. Memang mereka sangat memerlukan itu, kemarin mungkin mereka ke tempat kementerian dan saya diberi apa, tahu, bahwa mereka sudah ke tempat Pak Menteri, mereka minta dukungan dari kami Anggota Dewan, karena Pak Menteri terus terang, bus-bus yang selesai pun diserahkan ke Pemerintah Daerah, itu banyak yang nongkrong saja di sana, tidak digunakan itu, disayangkan sekali. Saya sendiri juga sering di Jayapura saya lihat, kok ini tidak jalan gitu. Kenapa tidak dikasih ke sekolah-sekolah jadi angkutan apa, masyarakat, terutama anak sekolah itu ya, nongkrong aja itu banyak di sana. Jadi, kalau bisa ini mohon menjadi perhatian.

Yang berikut Pak Menteri, saya sempat juga sampaikan, saya kasih proposal pada waktu itu tentang, ini keluhan dari Pemerintah Daerah di Dumai, pengelolaan Pelabuhan ya kan, tentang Kapal Tunda. Artinya pemerintah daerah dengan perusahaan daerahnya juga ingin bisa, karena kesiapan mereka untuk berpartisipasi, mereka tidak minta untuk monopoli semua, kalau itu 300 ya, 100 dikasih ke mereka gitu, ada bagi gitu ke pemerintah daerah ya kan, tetapi saya dapat info karena ini perusahaannya bekas punya mantan menteri lah, ya saya kira harusnya kita lebih mengedepankan bagaimana Pemerintah Daerahlah, tidak monopoli seperti itu, kalau pemerintah daerah sudah sanggup pada perusahaan daerahnya, ya dibagi gitu, kan tidak diambil semua gitu, harus dibagi gitu ya.

Yang berikut, ini saya dapat keluhan dan ini dimohon untuk bisa berkoordinasi dengan Pak Menteri tentang penyetopan pelayanan di daerah Sulawesi Tengah di daerah sana, terutama di daerah Morowali dan sekitarnya. Saya tadi bertanya kepada yang punya Dapil juga di sana, karena yang disampaikan ke saya kebetulan adalah Anggota DPR RI Fraksi Nasdem yang dari Dapil sana, kebetulan Wakil Ketua Umum saya juga, dan saya tanya kepada Pak Anwar Hafid, beliau dari Dapil sana dan beliau sangat mengerti dan beliau sangat mengetahui, dan kemarin beliau sudah langsung turun ke lapangan. Jadi, mungkin melalui Ketua, saya minta untuk beliau yang nanti coba jelaskan, supaya lebih paripurna, karena saya sebenarnya bukan Dapil sana, tapi yang ada Dapil sana ada di sini, ya keluhan ini saya melalui Anggota yang Dapilnya di Sulawesi Tengah. Mungkin bisa Pak Hafid Pak Ketua, siap Pak Hafid ya?

**KETUA RAPAT:**

Singkat aja Pak Hafid ya, harusnya tadi sekalian.

**F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si.):**

Makasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Singkat-singkat Pak. ya.

**F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si.):**

Terima kasih. Pimpinan.

Pak Menteri saya mohon maaf, tadi saya lupa satu sampaikan, memang ini salah satu keluhan. Pak Menteri dengan adanya kebijakan untuk pengurusan perizinan jembatan-jembatan apa, Pelabuhan Jeti ini, kita tahu persis memang bahwa di Morowali itu ada puluhan Pelabuhan Jeti yang saya tahu bahwa banyak yang tidak punya perizinannya belum lengkap, sehingga kebijakan ini tentu sekarang hampir sebagian besar kegiatan bongkar muat di tempat itu terhenti. Saya ingin menginformasikan Pak Menteri, bahwa kemarin

saya melakukan pengecekan beberapa *smelter*, itu stok material yang ada di setiap *smelter* itu semakin hari semakin menipis, PT. IMIP itu saja saya cek kurang lebih sekitar 32 hari lagi, itu selesai, sehingga kalau tidak ada lagi *supply* bahan setelah itu, maka pasti operasi *smelter* ini akan terhenti.

Oleh karena itu, mungkin ada kebijakan dari Pak Menteri, sehingga apabila mereka sudah melakukan proses perumusan izin, sehingga bisa diberikan dispensasi untuk bisa berjalan sampai perizinannya selesai, mungkin itu saran. Sehingga ini tidak terhenti aktivitas, karena masyarakat juga banyak yang bekerja di sektor itu. Saya kira ini tambahan dari saya Pak Ketua, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih Bapak-Ibu sekalian, sekarang sudah jam 13 ya, kita lanjut atau kita *break* makan dulu, nanti kira-kira jam 1 kita masuk atau jam 2 kita masuk lagi, atau, ini kan tinggal jawaban Pak Menteri *nih*.

Ya biar Pak Menteri jawab ke singkat saja ya, yang perlu dijawab, yang lain nanti jawab tertulis, lanjut ya? Lanjut ya? Ya, Pak Menteri, saya tidak ingin menambahkan berpanjang, saya pikir semua sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, ya Pak Menteri jawab yang dipandang perlu, karena agenda utama kita adalah soal serapan hari ini Pak, yang lain-lain nanti mungkin kan perlu data Bapak nih, contoh pertanyaan Pak Robert dan terakhir kan *nggak* mungkin dijawab sekarang, Bapak kan mesti cek lapangan, cek informasi dulu, nanti baru dijawab tertulis kepada kami, ya. Terkait soal ini aja dulu Pak Menteri serapan aja yang Bapak jawab dulu, silakan.

#### **MENTERI PERHUBUNGAN RI (Dr. (H.C.) Ir. BUDI KARYA SUMADI):**

Terima kasih, Pak.

Sarapan kita sebenarnya relatif lebih tinggi dari tahun lalu, dan tahun lalu kita salah satu Kementerian yang capaiannya tinggi melebihi 96%, itu nomor 3 dari 10 Kementerian terbesar, jadi *insya Allah* ini bisa dijalankan.

*Nah*, lebih detail kalau kita bicara mengenai belanja modal, memang di Patimbangan terdapat satu *pending* sebentar, karena proses lelang itu panjang, kita akan finalisasi kontrak pada awal Desember, pada saat itu relatif akan terserap.

SBSN memang kita sedang *manage*, karena ada beberapa yang kita realokasi. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang sifatnya atau kelebihan atau kita bisa tender lebih murah, kita realokasi pada kegiatan yang lain

Walaupun bukan soal anggaran, soal pesawat mungkin saya mesti memberikan penjelasan, bahwa memang pesawat ini adalah masalah *global*, bahwa pesawat yang ada di Indonesia ini berkurang dari, lebih dari 600,

sekarang ini tidak sampai 300, jadi *nggak* sampai 50%, sehingga terjadi kekurangan.

*Nah*, mengapa mahal, memang karena ongkos *leasing* dan ongkos bahan bakar itu melebihi dari 50%, dan ini kami tadi komparasi perjalanan Jakarta-Dubai dan Jakarta-Singapore, harganya itu relatif dua kali lipat, jadi ini berbanding lurus dengan apa yang dilakukan.

Namun demikian, kami tidak mendengarkan apa yang Bapak-Ibu sampaikan, itu pasti memberikan suatu kekhawatiran bagi masyarakat. Pertama kali kami akan melakukan penertiban, yang kedua kita berusaha untuk meng-*invite* beberapa penerbangan yang berminat ke sini, dan yang ketiga adalah beberapa Bandara sudah kita selesaikan dengan baik, di antaranya Silampari Pak Eddy Santana, terus Pak Hamka, itu ada Toraja, Ibu Novita itu ada Bandara Banjarnegara, yaitu kami mengajak Pemerintah Daerah untuk *sharing*. Pesawat itu kalau okupansinya di bawah 50% mereka rugi. *Nah*, oleh karenanya ada *block guaranteed* yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara bersama-sama. *Nah*, ini yang paling sukses itu adalah di Toraja, jadi Toraja-Makassar itu disubsidi oleh Pemda Provinsi dan Toraja, dan uang subsidi itu sekarang digunakan untuk Toraja ke Balikpapan. Jadi, itu udah *success story*. Kemarin kami mengadakan rapat secara khusus kita undang semuanya, terutama dari Kemendagri agar *format* ini dipakai di mana-mana.

Yang lain mungkin yang agak signifikan saya akan laporkan tentang Kertajati dan Bandung. Dalam *planning* kita, Cisumdawu akan selesai pada Desember atau awal Januari. Pada saat itu ada pembagian, Kertajati itu untuk yang jet, sedangkan yang Bandung itu untuk *propeller*. Jadi, ini kita akan laksanakan dengan baik. Tentang Cianjur walaupun ini cuman satu penanya Pak Mulyadi, kita akan *take care* besok saya ke sana Pak, dan kita akan *care* berkaitan dengan kebutuhan mereka, tetapi juga yang merupakan *domain-domain* dari kami.

Berkaitan dengan bandara-bandara tertentu, Wakatobi, Madura, Jember, dan sebagainya, kita akan bicara dengan Pemda untuk *block seat*. Secara khusus Pemda Wakatobi udah ketemu saya, Bapak, dan saya sudah sampaikan kepada beliau, silakan itu dilakukan, *insya Allah* bisa dilakukan.

Beberapa yang agak menggelitik saya harus, harus sampaikan di sini dua hal, KSOP Sorong kita akan klarifikasi Pak, kalau memang itu terjadi kita akan ambil tindakan yang tegas.

Yang kedua tentang Jeti, ini mungkin kami mohon dukungan dari Bapak-Ibu sekalian, 30% dari Jeti-jeti itu adalah liar Pak, karena Bapak menganjurkan kami untuk meningkatkan itu, kita berikan teguran, setelah teguran *nggak* ber-*anu* kita *stop*, tapi kita memberikan ruang bahwa dia boleh beroperasi 3 bulan sampai 6 bulan, dengan catatan dia akan mengusulkan sebagai BOP. Mengapa BOP? Supaya penggunaan Jeti itu tidak banyak sekali. Jadi, memang kita inventarisasi ada beberapa tempat, satu di Palembang, satu di Kaltim Pak, Pak Irwan, satu lagi di wilayah Pak Ridwan Bae, 30% itu tidak, tidak resmi.

Oleh karenanya, kita mohon dukungan, bahwa kita akan memberikan legitimasi izin, dengan catatan mereka memberikan *guarantee*, dia akan mengurus izin ya, kita berikan operasi 3 bulan sampai 6 bulan tapi kita *charge* ya. Jadi ini, kita untuk menaikkan PNBP ini juga akan menggunakan satu pengamatan secara detail, supaya penerimaan kita lebih besar.

Yang lain mengenai Bus Damri juga cuman topiknya satu, saya harus terus terang bahwa pada saat itu sebagian kita kasih Pemda Pak, sebagian kita kasih Damri, *nah* yang menganggur itu saya pikir yang dari Pemda, kalau yang Damri udah jalan semuanya, karena ini berkaitan dengan *policy* terpaksa saya walaupun satu yang tanya saya harus jawab.

Demikian Pak Ketua, jawaban dari saya, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

### **KETUA RAPAT:**

Baik, Pak Menteri terima kasih, kita setuju Pak, ini soal Jetti-Jetti liar nih banyak sekali seluruh Indonesia ini, kita dukung Pak Menteri 1000% kita dukung Kementerian untuk merapikan ini, negara ini harus terukur semuanya Pak, masa ada yang pakai izin, ada yang tidak pakai izin, bisa operasi terus, ada yang resmi ada yang liar, *nggak* ada bedanya sama saja, kan aneh ini. Sekarang Pak Menteri tertibkan, yang liar itu Bapak udah kasih waktu 3 bulan sampai 6 bulan, di luar dari 3 bulan sampai 6 bulan kalau *nggak* mengurus izin tutup, tutup aja Pak, karena itu juga terjadi *moral hazard* di situ, saya tahu itu, sudah *ngerti* kita, terjadi *moral hazard* juga di situ, termasuk ini melibatkan KSOP-KSOP kita, kan kita tidak mungkin *ngontrol*, saya ngertilah Pak Menteri tidak mungkin ngontrol 24 jam dari Sabang sampai Merauke, ini rumus *supply demand* ini Pak, ada *supply* ada *demand*.

*Nah*, akhirnya kan kita tidak bisa mengawasi, kita setuju Pak, dan mohon nanti Pak Menteri *report* ke kita, mana-mana saja, di daerah mana saja yang sekarang dikasih kesempatan 3 sampai 6 bulan, supaya nanti dukungan politik kita juga keluar Pak, terhadap kebijakan Pak Menteri, manakala nanti seluruh Jetti-Jetti itu ditutup ketika tidak mengurus izin, gitu ya teman-teman ya, baik, bagaimana PNBP mau naik Pak, kalau di sana liar ,di sini liar ya.

Terakhir kesimpulan rapat silakan ditayangkan. Ini takutnya ada hubungan sama goncangan yang kemarin ini, gimana, bisa kesimpulan rapat kita ini, atau *nggak* kasih aja ke Pak Menteri satu lembar saya bacakan biar cepat tolong, baik saya baca Pak Menteri ya, kita simak secara seksama kalau ada nanti koreksi mohon izin, jangan satu aja, bagi juga Sekjenya, ya bagi lagi, sana, kasih sana.

Baik, karena berhubungan gangguan teknis, kita kembali ke masa lalu, ya, sementara kita kembali ke masa lalu, baik, memang hidup ini kadang-kadang nostalgia itu penting Pak, karena kata orang kalau nostalgia itu diingat



kembali, jadi ingatan kita tuh bisa menjadi bagus, ya apalagi yang bening-bening waktu SMA Pak Ridwan ya? Ya, Pak Ridwan pun bilang ya sama saya.

Draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan, Kamis, 24 November 2022.

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan atas Capaian Realisasi Program dan Anggaran Tahun 2022 sampai dengan bulan November 2022 sebagai berikut: Kementerian Perhubungan Realisasi Keuangan per tanggal 22 November 2022 capaiannya 75,63%, itu realisasi keuangannya. Kemudian realisasi fisiknya sampai dengan 22 November 2022 adalah 78,25%. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk mempercepat peningkatan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sesuai saran dan masukkan Komisi V DPR RI.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan agar meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi, serta melaksanakan koordinasi secara reguler untuk memaksimalkan pelaksanaan program dan anggaran di masing-masing Unit Kerja Eselon I.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan antara lain:
  - a. Melakukan evaluasi terhadap Bandara yang belum berfungsi optimal dan minimnya layanan penerbangan di beberapa bandara di Indonesia;
  - b. Memaksimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di semua Sub Sektor Perhubungan;
  - c. Meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan *Over Dimension* dan *Over Loading* (ODOL).

Ini yang terkait dengan banyaknya jalan yang rusak Pak, di seluruh Indonesia akibat *over dimension* dan *over loading* ini.

Pak Menteri ini kesimpulan rapat kalau dapat disetujui saya ketok, saya rasa tidak ada yang tidak boleh kita setuju ini Pak.

### **(RAPAT: SETUJU)**

Baik, Pak Menteri sebagai informasi, kemarin Baleg sudah menyepakati Pak dan akan dinaikkan ke Paripurna Prolegnas Prioritas DPR, yang akan disampaikan pada Paripurna terdekat, salah satunya agenda Komisi V DPR RI sudah masuk Pak, terkait dengan revisi Undang-Undang 22/2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kami dari Komisi V nih, Pak Menteri belum, sudah sangat sering menerima berbagai pihak *stakeholder*, supaya Komisi V menginisiasi revisi Undang-Undang 22/2009, dan Komisi V ini belum pernah menerima para pihak yang menolak revisi. *Nah*, ini perlu saya sampaikan Pak, karena kemarin sempat agak ini sedikit Pak, tarik-tariknya Pak Menteri juga tahulah ini ya, agak ramai ini kemarin, hampir *voting* Pak, ya, tapi, *voting* ya, *voting*, *voting* 5-4 Pak, ya di Baleg, *voting* 5-4, di sini 8-1, 8-1 karena ada teman satu keluar ngerokok Pak, jadi lupa dia ikut *voting*, yang merokok, minta izin dulu ngerokok jadi, ya

sudah kita tidak hitung, jadi 8-1. Tapi, *nyampai* ke Baleg pertarungan lebih kencang Pak, 5-4, cuma saya mau sampaikan kepada forum yang terhormat ini rapat juga dimonitor *nih*, Pak, seluruh Rakyat Indonesia, karena ini *live*.

Komisi V DPR RI sudah sering menerima berbagai pihak, supaya Komisi V menginisiasi segera merevisi Undang-Undang 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan belum pernah sekalipun Komisi V menerima para pihak yang menolak untuk melakukan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akhirnya kemarin sepakat untuk direvisi dan tinggal disahkan di Paripurna.

Oleh karenanya, ini sebagai pemberitahuan Pak Menteri, dokumen kami sudah lengkap segera akan kami kirim sesuai dengan mekanisme dan alur pembahasan legislasi yang ada nanti di DPR ini, tentu kami akan Rapat Internal dan seterusnya terlebih dahulu.

Demikian Bapak-Ibu sekalian, kalau sudah tercapai kesimpulan rapat dan sudah disepakati, maka selesailah rapat kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya mohon Pak Menteri menyampaikan sambutan penutup.

**MENTERI PERHUBUNGAN RI (Dr. (H.C.) Ir. BUDI KARYA SUMADI):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Shalom,  
Om swastiastu,  
Namo budaya, dan  
Salam kebajikan,*

**Pak Ketua Komisi V, Wakil Ketua Komisi V, dan Bapak-Ibu sekalian,**

Hari ini cukup singkat tapi lugas masukkan-masukkan dari Komisi V, kami semua mendengar, mencatat, akan mengevaluasi apa yang menjadi masukkan-masukkan, ya memang dengan adanya anggaran yang relatif terbatas, tidak semua itu bisa terlaksana, tetapi kami berusaha melakukan upaya-upaya, katakanlah pada lintasan-lintasan sungai, kita akan berikan dermaga dan sebagainya, juga angkutan darat yang merupakan hajat hidup orang banyak kita akan lakukan. Tentang angkutan udara juga akan kita carikan solusi, memang ini adalah gejala atau masalah global, tentu kami tidak tinggal diam, kami akan melakukan studi-studi banding ke beberapa negara, bagaimana negara-negara tersebut untuk melakukan suatu solusi berkaitan dengan ini, terutama pada negara-negara yang penerbangannya banyak dan wilayahnya besar.

Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih, semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk bangsa, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Menteri, kita kasih *applause* Pak Menteri, ya. Ya, Pak Menteri kami menyerahkan sedikit sementara hasil, tapi saya mau tanya teman-teman dulu *nih*, saya ada usul, apakah yang mau kita serahkan ini kita bahas dulu di rapat internal, maksud saya biar semuanya, ini kan prioritas nih Pak Hamka, ya.

**F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):**

Apanya itu Pak Ketua?

**KETUA RAPAT:**

Ini nih, ini hasil kunjungan kerja.

**F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):**

Oke saya kira itu disahkan saja.

**KETUA RAPAT:**

Iya, kita rapat internal dulu ya, *nggak* usah kita serahkan ya?

**F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Ini kan untuk 2022 ini, *sorry* 2024, 2023 udah lewat juga.

Baik nanti akan kita serahkan setelah kita rapat, dibahas di rapat internal apa aja yang mau kita serahkan secara resmi di rapat ini kepada Pemerintah.

Baik, sudah, kan sudah, ya nanti saya minta tolong kita semua, kita bahaslah ya, ini kita bahas bahan semua nanti teman-teman inikan supaya, karena ini resmi menyangkut poksi. Karena yang udah-udah dulu saya melihat juga *tuh* di APBN, daerah-daerah yang tidak pernah kunjungan spesifik kan *nggak* kebagian pembangunan nanti, padahal orangnya ada di sini gitu loh, *enggak fair* juga gitu loh.

Jadi, saya rasa demikian maka saya atas nama Pimpinan menyampaikan terima kasih atas kehadiran Pak Menteri dan mohon maaf.

**F-PDIP (DJENRI ALTING KEINTJEM, S.H., M.H.):**

Interupsi Ketua, saya mau serahkan ini.

**KETUA RAPAT:**

Oh iya, kalau mau serahkan, serahkan dulu, silakan, silakan, silakan.

**KETUA RAPAT:**

Kakinya udah kena juga keliatannya.

Baik terima kasih, selesailah rapat kita pada hari ini. Saya atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI menyampaikan terima kasih sekali lagi Pak Menteri dan mohon maaf manakala dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan, dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, rapat ini saya nyatakan selesai dan saya tutup.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*  
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.00 WIB)**

**JAKARTA, 24 November 2022**

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

**NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.**

**NIP. 196912021998032002**